



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN AUDITED DJPK TA 2018

**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah unit Eselon I dari Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2018 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 31 Desember 2018
Sekretaris Direktorat Jenderal,



m Rukijo sbn

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Laporan Keuangan Pokok	
Ringkasan Laporan Keuangan	1
Pernyataan Tanggung Jawab	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
A.1. Dasar Hukum	9
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Ditjen Perimbangan Keuangan	10
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.4. Basis Akuntansi	11
A.5. Dasar Pengukuran	11
A.6. Kebijakan Akuntansi	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	17
B.2. Belanja Negara	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
C.1. Aset	30
C.2. Kewajiban Jangka Pendek	39

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	39
D.2. Beban Pegawai	40
D.3. Beban Persediaan	40
D.4. Beban Barang dan Jasa	40
D.5. Beban Pemeliharaan	41
D.6. Beban Perjalanan Dinas	42
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	42
D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	43
D.9. Kegiatan Non Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
E.1. Ekuitas Awal	44
E.2. Surplus (Defisit) LO	44
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan	44
E.4. Transaksi Antar Ekuitas	44
E.5. Ekuitas Akhir	45
Laporan Keuangan Pendukung	
Laporan e-Rekon&LK	45
Rekening Pemerintah	57
Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN	59
Berita Acara Migrasi	62

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	1
Tabel 2	: Ringkasan Neraca Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	2
Tabel 3	: Penentuan Kualitas Piutang	16
Tabel 4	: Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel 5	: Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Audited TA 2018	18
Tabel 6	: Perbandingan Realisasi PNBPN Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	18
Tabel 7	: Perbandingan Realisasi Belanja Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	21
Tabel 8	: Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Audited TA 2013 s.d 2018	22
Tabel 9	: Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Audited TA 2018	23
Tabel 10	: Realisasi Belanja Per Kegiatan Audited TA 2018	23
Tabel 11	: Realisasi Belanja Pegawai Audited TA 2018	24
Tabel 12	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	24
Tabel 13	: Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Audited TA 2013 s.d. 2018	25
Tabel 14	: Realisasi Belanja Barang Audited TA 2018	26
Tabel 15	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	26
Tabel 16	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang Audited TA 2013 s.d. 2018	27
Tabel 17	: Realisasi Belanja Modal Audited TA 2018	27
Tabel 18	: Perbandingan Realisasi Modal Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	27
Tabel 19	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Barang Audited TA 2013 s.d 2018	29
Tabel 20	: Perbandingan Realisasi Pengembalian Belanja Modal Audited TA 2018 dan 2017	30
Tabel 21	: Perbandingan Neraca Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	30
Tabel 22	: Perbandingan Nilai Aset Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	30
Tabel 23	: Rincian Aset per Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	31
Tabel 24	: Data Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	31
Tabel 25	: Rincian Persediaan per Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	32
Tabel 26	: Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset	33
Tabel 27	: Daftar Perbandingan Aset Tetap Antara Neraca dan SIMAK-BMN per Audited TA 2018	33
Tabel 28	: Perbandingan Posisi Peralatan dan Mesin	34
Tabel 29	: Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin	34
Tabel 30	: Perbandingan Posisi Aset Tetap Lainnya	35
Tabel 31	: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	35
Tabel 32	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	36
Tabel 33	: Perbandingan Posisi Aset Lainnya per Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	36
Tabel 34	: Perbandingan Aset Tak Berwujud per Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	36
Tabel 35	: Mutasi/Perubahan Aset Tak Berwujud	37
Tabel 36	: Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud	37
Tabel 37	: Daftar Perbandingan Aset Tak Berwujud Antara Modul GLP dan Modul Aset per Audited TA 2018	37
Tabel 38	: Perbandingan Posisi Aset Lain-Lain	38

Tabel 39	:	Mutasi/ Perubahan Aset Lain-lain	38
Tabel 40	:	Daftar Perbandingan Aset Lain-Lain Antara Neraca dan SIMAK-BMN per AuditedTA2018	39
Tabel 41	:	Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga	39
Tabel 42	:	Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	39
Tabel 43	:	Rincian Beban Pegawai Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	40
Tabel 44	:	Rincian Beban Persediaan Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	40
Tabel 45	:	Rincian Beban Jasa Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	41
Tabel 46	:	Rincian Beban Pemeliharaan Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	41
Tabel 47	:	Rincian Beban Perjalanan Dinas Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	42
Tabel 48	:	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	42
Tabel 49	:	Rincian Kegiatan Non Operasional Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	43
Tabel 50	:	Perbandingan Nilai Ekuitas Awal	44
Tabel 51	:	Perbandingan Surplus/Defisit LO	44
Tabel 52	:	Rincian Nilai Transaksi Antar Ekuitas	44
Tabel 53	:	Perbandingan Nilai Ekuitas Akhir Audited 2018 dan Audited 2017	45

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 : Perbandingan Realisasi Belanja Belanja Audited TA 2018 dan Audited TA 2017	22
Grafik 2 : Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Audited TA 2013 s.d. 2018	22
Grafik 3 : Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Audited TA 2018	23
Grafik 4 : Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Audited TA 2018	25
Grafik 5 : Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Pegawai Audited TA 2013 s.d. 2018	25
Grafik 6 : Komposisi Realisasi Belanja Barang Audited TA 2018	27
Grafik 7 : Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Barang Audited TA 2013 s.d. 2018	27
Grafik 8 : Komposisi Realisasi Belanja Modal Audited TA 2018	28
Grafik 9 : Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Modal Audited TA 2013 s.d. 2018	29
Grafik 10 : Komposisi Aset Tetap	33

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pasal 28 ayat (3), Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Audited Tahun 2018 menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Audited TA 2018 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp677.539.156,00**. Realisasi Belanja Negara pada Audited TA 2018 adalah sebesar **Rp125.898.311.033,00** atau mencapai **86,25** persen dari anggaran sebesar **Rp145.975.618.000,00**. Jumlah realisasi Belanja tersebut semuanya berasal dari realisasi Belanja Rupiah Murni.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Audited TA 2018 dan Audited 2017

(dalam rupiah)

Uraian	Audited TA 2018		Audited TA 2017	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	-	677.539.156	-	1.727.983.827
Jumlah Pendapatan	-	677.539.156	-	1.727.983.827
Belanja Pegawai	34.749.826.000	32.825.097.316	34.632.363.000	28.676.039.218
Belanja Barang	87.201.906.000	70.054.090.587	73.087.438.000	61.653.759.915
Belanja Modal	24.023.886.000	23.019.123.130	21.295.295.000	19.551.285.045
Jumlah Belanja	145.975.618.000	125.898.311.033	129.015.096.000	109.881.084.178

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2018 tentang sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar **Rp38.777.681.234,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp1.669.447.837,00** Aset Tetap sebesar **Rp35.756.025.077,00** dan Aset Lainnya sebesar **Rp1.352.208.320,00**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2018 disajikan sebesar **Rp136.800.920,00** dan **Rp38.640.880.314,00** sehingga total nilai kewajiban dan ekuitas adalah sebesar **Rp38.777.681.234,00**.

Ringkasan Neraca Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2

Ringkasan Neraca Audited TA 2018 dan Audited 2017

(dalam rupiah)

Uraian	Audited TA 2018	Audited TA 2017	Kenaikan / (Penurunan)
Aset	38.777.681.234	24.312.444.535	14.465.236.699
Aset Lancar	1.669.447.837	2.258.890.806	(589.442.969)
Aset Tetap	35.756.025.077	21.838.093.144	13.917.931.933
Aset Lainnya	1.352.208.320	215.460.585	1.136.747.735
Kewajiban	136.800.920	56.899.227	79.901.693
Kewajiban Jangka Pendek	136.800.920	56.899.227	79.901.693
Ekuitas	38.640.880.314	24.255.545.308	14.385.335.006
Ekuitas	38.640.880.314	24.255.545.308	14.385.335.006

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp94.847.744,00**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp115.493.702.613,00** sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar **Rp(115.398.854.869,00)**. Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa surplus sebesar **Rp462.227.787,00** sehingga entitas mengalami Defisit sebesar **Rp(114.936.627.082,00)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp24.255.545.308,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(114.936.627.082,00), kemudian ditambah koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan sebesar Rp98.875.970,00 dan Transaksi antar entitas sebesar Rp129.223.086.118,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp38.640.880.314,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Pendapatan Negara dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Laporan Operasional dan Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2018, nilai Pendapatan, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setarakan diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja (440941) Ditjen Perimbangan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 31 Desember 2018

Sekretaris Direktorat Jenderal,


m Rukijo sbw

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Audited TA 2018			Audited TA 2017
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	677.539.156	0,00%	1.727.983.827
JUMLAH PENDAPATAN			677.539.156	0,00%	1.727.983.827
BELANJA					
BELANJA OPERASI	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	34.749.826.000	32.825.097.316	94,46%	28.676.039.218
Belanja Barang	B.2.2	87.201.906.000	70.054.090.587	80,34%	61.653.759.915
Jumlah Belanja Operasi		121.951.732.000	102.879.187.903	84,36%	90.329.799.133
BELANJA MODAL	B.3				
Belanja Tanah	B.3.1				0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.3.2	11.154.887.000	10.673.546.847	95,68%	12.831.909.121
Belanja Modal Lainnya	B.3.4	12.868.999.000	12.345.576.283	95,93%	6.719.375.924
Jumlah Belanja Modal		24.023.886.000	23.019.123.130	95,82%	19.551.285.045
JUMLAH BELANJA		145.975.618.000	125.898.311.033	86,25%	109.881.084.178

Jakarta, 31 Desember 2018
Sekretaris Direktorat Jenderal,


M Rukijo *stn*

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN NERACA

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	Audited 2018	Audited 2017
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Bukan Pajak	C.1	55.254.165	50.733.906
Penyisihan Piutang tak Tertagih	C.2	(50.756.507)	(50.733.906)
Bukan Pajak			
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.3	0	0
Persediaan	C.4	1.664.950.179	2.258.890.806
Jumlah Aset Lancar		1.669.447.837	2.258.890.806
ASET TETAP			
Peralatan dan mesin	C.5	100.841.547.680	93.840.931.062
Gedung dan Bangunan	C.6	899.754.000	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.7	990.851.337	990.851.337
Aset Tetap Lainnya	C.8	11.732.950.373	789.445.090
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.9	20.956.000	0
Akumulasi Penyusutan	C.10	(78.730.034.313)	(73.783.134.345)
Jumlah Aset Tetap		35.756.025.077	21.838.093.144
ASET LAINNYA			
Aset tak Berwujud	C.11	3.239.813.385	1.858.698.385
Aset Lain-Lain	C.12	2.312.638.761	1.934.248.104
Akumulasi penyusutan dan Amortisasi	C.13	(4.200.243.826)	(3.577.485.904)
Jumlah Aset Lainnya		1.352.208.320	215.460.585
JUMLAH ASET		38.777.681.234	24.312.444.535
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.14	136.800.920	56.899.227
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		136.800.920	56.899.227
JUMLAH KEWAJIBAN		136.800.920	56.899.227
EKUITAS			
Ekuitas	C..15	38.640.880.314	24.255.545.308
JUMLAH EKUITAS		38.640.880.314	24.255.545.308
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		38.777.681.234	24.312.444.535

Jakarta, 31 Desember 2018
Sekretaris Direktorat Jenderal,


 m Rukijo sbw

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	Audited 2018	Audited 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1	94.847.744	88.401.206
Pendapatan Hibah	D.1.2	0	0
Jumlah Pendapatan Operasional		94.847.744	88.401.206
BEBAN OPERASIONAL			
	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	32.904.999.009	28.650.967.351
Beban Persediaan	D.2.2	2.258.173.169	2.153.428.740
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	31.574.187.583	31.409.600.897
Beban Pemeliharaan	D.2.4	7.618.858.802	10.717.190.548
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	32.331.698.866	28.482.307.846
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	8.805.762.583	6.217.885.641
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.7	22.601	(1.818.182)
Beban Lain-Lain	D.2.8	0	0
Jumlah Beban Operasional		115.493.702.613	107.629.562.841
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(115.398.854.869)	(107.541.161.635)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar			
	D.3.1		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1.1	121.983.288	1.486.828.263
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1.2	34.757.143	476.000
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		87.226.145	1.486.352.263
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
	D.3.2.		
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.2.1	427.372.165	143.654.182
Beban kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.2.2	52.370.523	84.305.780
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya		375.001.642	59.348.402
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		462.227.787	1.545.700.665
POS LUAR BIASA			
	D.4	0	0
Beban Luar Biasa	D.4.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(114.936.627.082)	(105.995.460.970)

Jakarta, 31 Desember 2018

Sekretaris Direktorat Jenderal,


 Rukijo sbn

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	PERIODE	
		Audited 2018	Audited 2017
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E.1	24.255.545.308	18.284.052.781
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(114.936.627.082)	(105.995.460.970)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	98.875.970	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	0	0
Selisih Revaluasi aset Tetap	E.3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.4	98.875.970	0
Koreksi lain-Lain	E.3.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	129.223.086.118	111.966.953.497
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		14.385.335.006	5.971.492.527
EKUITAS AKHIR	E.6	38.640.880.314	24.255.545.308

Jakarta, 31 Desember 2018
Sekretaris Direktorat Jenderal,


 M Rukijo sbn

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2018 tentang Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Negara/Lembaga;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2018 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Pembentukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan upaya penataan hubungan keuangan antara pusat dan daerah seiring dengan perkembangan dinamis yang terkait dengan keuangan pusat dan daerah.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semesteran Tahun Anggaran 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu SAKTI menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerapkan basis Akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

A.5 DASAR PENGUKURAN

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan DJPK dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semesteran Tahun Anggaran 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh DJPK yang merupakan entitas pelaporan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LRA

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan-LRA*

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan *azas bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LO

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan-LO*

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada DJPK adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan *azas bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Kebijakan Akuntansi atas Belanja

*Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja*

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Kebijakan Akuntansi atas Beban

*Kebijakan
Akuntansi atas
Beban*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Kebijakan Akuntansi atas Aset

*Kebijakan
Akuntansi atas
Aset*

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya:

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan.

Kas disajikan dalam Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan dalam Neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai

bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Nilai Aset Tetap disajikan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

6. Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas*

7. Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam laporan Perubahan Ekuitas.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan
Piutang Tidak
tertagih*

8. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penentuan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penentuan Kualitas Piutang disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3

Penentuan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;	0.5%
Kurang lancar	Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;	10%
Diragukan	Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau 2. Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.	100%

9. Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

*Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan Aset
Tetap*

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap :

- Tanah
- Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2018 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum Tabel Masa Manfaat Aset Tetap disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap lainnya (alat musik modern)	4 tahun

10. IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PERTAMA KALI

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Implementasi
Akuntansi
Berbasis Akrual
Pertama Kali

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Audited TA 2018 adalah sebesar Rp677.539.156,00. DJPK tidak menetapkan target dalam APBN Audited TA 2018. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 Audited sebesar Rp1.727.983.927,00, realisasi PNBP Audited TA 2018 mengalami penurunan sebesar (Rp1.050.444.671,00) atau -61,79 persen. Semua penerimaan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PNBP pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berasal dari Pendapatan PNBP Lainnya, Pendapatan Denda, dan Pendapatan Lain Lain, dimana pos penerimaan terbesar berasal dari 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL atas kelebihan pembayaran BPJS Tahun 2017 senilai Rp99.855.840,-. Besarnya realisasi PNBP TA Audited 2018 per akun dapat dilihat dalam tabel 5 berikut.

Realisasi PNBP
Rp677.539.156,00

Tabel 5

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Audited TA 2018

Uraian	Estimasi	Realisasi
Pendapatan Penjualan Hasil Non Litbang Lainnya	0	36.000.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	64.094.400
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	57.888.888
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	54.327.485
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	3.036.574
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	363.315.839
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	98.875.970
Total	0	677.539.156

Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6

Perbandingan Realisasi PNBPN Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Uraian	AUDITED 2018	AUDITED 2017	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Penjualan Hasil Non Litbang Lainnya	36.000.000	-	36.000.000	-100,00%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	64.094.400	-		
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	57.888.888	1.486.828.263	-1.428.939.375	-96,11%
Pendapatan Penjualan Lainnya	-	1.150.000	-1.150.000	-100,00%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	285.140	-285.140	-100,00%
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	54.327.485	88.829.002	-34.501.517	-38,84%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	3.036.574	30.982.380	-27.945.806	-90,20%
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	363.315.839	61.641.564	301.674.275	489,40%
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	98.875.970	58.267.478	40.608.492	
Total	677.539.156	1.727.983.827	-1.050.444.671	-60,79%

Tidak terdapat pengembalian pendapatan selama Audited TA 2018.

B.1.1 Pendapatan Penjualan Hasil Non Litbang Lainnya

Pendapatan Penjualan Hasil Non Litbang Lainnya Rp36.000.000,00

Pendapatan Penjualan Hasil Non Litbang Lainnya adalah PNBPN Lainnya yang berasal dari penjualan selain kelompok pendapatan atas penjualan-penjualan hasil tambang batubara; hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan budidaya; dokumen pelelangan; cadangan beras pemerintah dalam rangka operasi pasar murni; dan tidak berasal dari kegiatan penelitian / pengembangan.

Sampai dengan 31 Desember 2018, pendapatan penjualan hasil non litbang lainnya senilai Rp36.000.000,00 berasal dari penjualan pemusnahan 11.257 bundel arsip tanggal 3 Agustus 2018 sesuai KEP-378/KM.1/2018 tanggal 4 Juni 2018, pada 10 Agustus 2018 dengan NTPN nomor 2537347NHB4OHL8.

*Pendapatan dari
Penjualan Peralatan
dan Mesin
Rp64.094.400,00*

B.1.2 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin adalah PNBP Lainnya yang berasal dari penjualan peralatan dan mesin.

Sampai dengan 31 Desember 2018, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin senilai Rp64.094.400,00 berasal dari penjualan BMN berupa kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang dengan ASN a.n. Boediarso Teguh Widodo pada 15 Agustus 2018 sesuai surat keterangan pelunasan pembayaran nomor KET-61/PK.1/2018 dengan nomor NTPN D45EBOA0T1HA5VFO. Kendaraan perorangan dinas tersebut telah dihapuskan sesuai surat keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan nomor KEP-16/PK.1/2018 tentang penghapusan BMN pada DJPK tanggal 20 Agustus 2018.

*Pendapatan dari
Pemindahtanganan
BMN Lainnya
Rp57.888.888,00*

B.1.3 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya adalah PNBP Lainnya yang berasal dari penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut penjualan setelah mendapatkan persetujuan dari Biro Perlengkapan Setjen selaku pengelola BMN di lingkungan Kemenkeu dan persetujuan Kepala KPKNL atas nama Menkeu selaku Pengguna Barang.

Sampai dengan 31 Desember 2018, pendapatan dari pemindahtanganan BMN sebesar Rp57.888.888,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 26 Juni 2018 dengan nomor NTPN 0DF5A5VGSKTT7KP9.

*Pendapatan Denda
Keterlambatan
Penyelesaian
Pekerjaan
Pemerintah
Rp54.327.485,00*

B.1.4 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah adalah penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.

Sampai dengan 31 Desember 2018, pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah senilai Rp54.327.485,00 berasal dari 2 transaksi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah senilai Rp41.682.500,00, berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontrak pengadaan seminar kit dana desa CV. Mekarsari Ardhi tahun 2016 tanggal 17 Juli 2018 sesuai NTPN nomor 882F1831DCAQ6TEO; dan
2. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah senilai Rp5.176.651,00, berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontrak pengadaan kendaraan jemputan tanggal 21 September 2018 sesuai potongan SPM nomor 01613T dan SP2D nomor 180191304016844.
3. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah senilai Rp1.883.970,00, berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontrak sesuai potongan SPM nomor 02214T dan SP2D nomor 180191302049254.

4. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah senilai Rp1.636.364,00, berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontrak sesuai potongan SPM nomor 02669T dan SP2D nomor 180191302060685.
5. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah senilai Rp1.974.000,00, berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontrak pengadaan belanja modal tanggal 26 Desember 2018 sesuai potongan SPM nomor 03067T dan SP2D nomor 180191304027040.
6. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah senilai Rp1.974.000,00, berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontrak pengadaan belanja modal tanggal 26 Desember 2018 sesuai potongan SPM nomor 03068T dan SP2D nomor 180191304027283.

B.1.5 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu

*Penerimaan Kembali
Belanja Pegawai
Pusat TAYL
Rp3.036.574,00*

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL adalah PNBPN Lainnya yang berasal dari pembayaran kembali atas kelebihan bayar belanja pegawai yang telah diterima oleh pegawai pada tahun anggaran yang lalu.

Sampai dengan 31 Desember 2018, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp3.036.574,00 berasal dari 2 transaksi dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan kembali belanja pegawai senilai Rp359.574,00, berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang dicatat dengan akun 423951 dengan dokumen SPM/SP2D sebagai berikut:
 - SPM : 00001A tanggal 2 Januari 2018;
 - SP2D : 180191503000050 tanggal 2 Januari 2018.

Sesuai dengan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dicatat dengan akun 425911. Koreksi perubahan akun dari semula 423951 menjadi 425911 dilakukan pada bulan Juli sesuai dengan S-612/PK.1/2018 tanggal 17 Juli 2018, sehingga masih terdapat Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang tercatat dengan akun 423951 pada Laporan Keuangan Audited TA 2018.

2. Penerimaan kembali belanja pegawai senilai Rp2.677.000,00 berasal dari Pengembalian Gaji Induk Desember 2017 a.n Noviyanti, pada tanggal 11 Januari 2018 sesuai NTPN 2B3B92MQFC6G21FO.

B.1.6 Penerimaan Kembali Belanja Barang Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu

*Penerimaan Kembali
Belanja Barang TAYL
Rp363.315.839,00*

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL adalah PNBPN Lainnya yang diakibatkan oleh pembayaran kembali atas kelebihan bayar belanja barang yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran yang lalu.

Sampai dengan 31 Desember 2018, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp 363.315.839,00 berasal dari penerimaan kembali atas berbagai akun belanja dengan penerimaan kembali paling besar adalah sebesar Rp99.855.840,00 atas penerimaan kembali kelebihan pembayaran BPJS Tahun

2017 PT.Tritunggal Sejahtera Margawi tanggal 25 April 2018 sesuai NTPN 33BAA346EFBDCBSO.

B.1.7 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

*Penerimaan Kembali
Belanja Modal TAYL
Rp98.875.970,00*

Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL adalah PNPB Lainnya yang diakibatkan oleh pembayaran kembali atas kelebihan bayar belanja modal yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran yang lalu.

Sampai dengan 31 Desember 2018, Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp 98.875.970,00 berasal dari penerimaan kembali belanja modal atas transaksi pengembalian kekuarangan volume pelaksanaan pekerjaan renovasi Gedung Radius Prawiro Lantai 11 dan 12 PT. Pentas Menara Komindo pada tanggal 26 April 2018 sesuai NTPN 933DF4MJPF52GQL8.

B.2. BELANJA NEGARA

*Realisasi belanja
Rp125.898.311.033,0
0*

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Audited TA 2018 adalah sebesar Rp125.898.311.033,00 atau 86.25 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp145.975.618.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp768.941.903,00.

Realisasi belanja Audited TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp16.017.226.855,00 atau -14,58 persen dari realisasi belanja Audited TA 2017 sebesar Rp109.881.084.178,00. Persentase realisasi belanja terhadap pagu belanja Audited TA 2018 mengalami kenaikan dari 85,17 persen di Audited 2017 menjadi 86,25 persen di Audited 2018.

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menurut jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Perbandingan antara realisasi belanja Audited 2018 dan Audited 2017 dapat dilihat pada Tabel 7 dan Grafik 1 berikut:

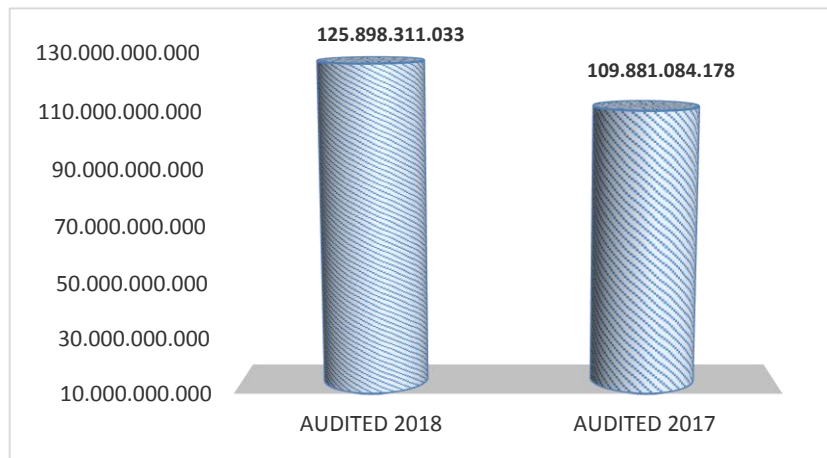
Tabel 7

Perbandingan Realisasi Belanja Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Uraian	AUDITED 2018	AUDITED 2017	Kenaikan / Penurunan	%
Realisasi Belanja	125.898.311.033	109.881.084.178	16.017.226.855	14,58%

Grafik 1

Perbandingan Realisasi Belanja Audited TA 2018 dan Audited TA 2017



Perkembangan pagu, realisasi, dan persentase realisasi belanja Audited TA 2013 sampai dengan 2017 dan Audited TA 2018 dapat dilihat pada Tabel 8 dan grafik 2 berikut:

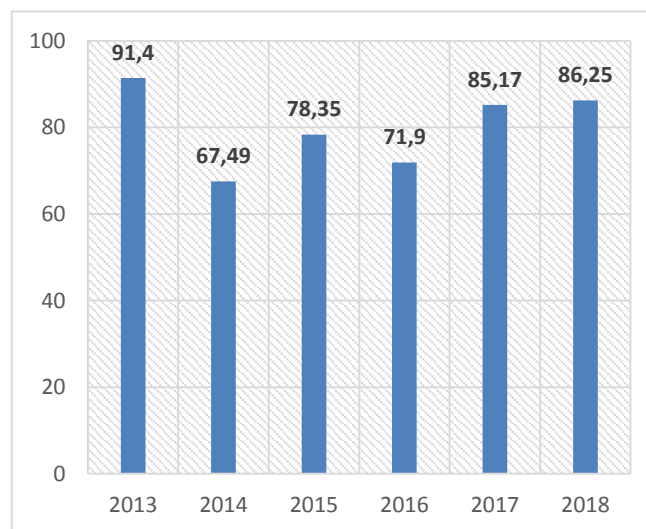
Tabel 8

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Audited TA 2013 s.d 2018

Tahun	Pagu	Realisasi (Rp)	%
2013	121.738.090.000	111.265.447.424	91,40%
2014	107.299.994.000	72.417.132.539	67,49%
2015	165.163.319.000	129.413.591.230	78,35%
2016	126.078.440.000	90.651.692.999	71,90%
2017	129.015.096.000	109.881.084.178	85,17%
2018	145.975.618.000	125.898.311.033	86,25%

Grafik 2

Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Audited TA 2013 s.d. 2018



Realisasi Belanja menurut jenis belanja disajikan pada tabel 9 berikut.

Tabel 9

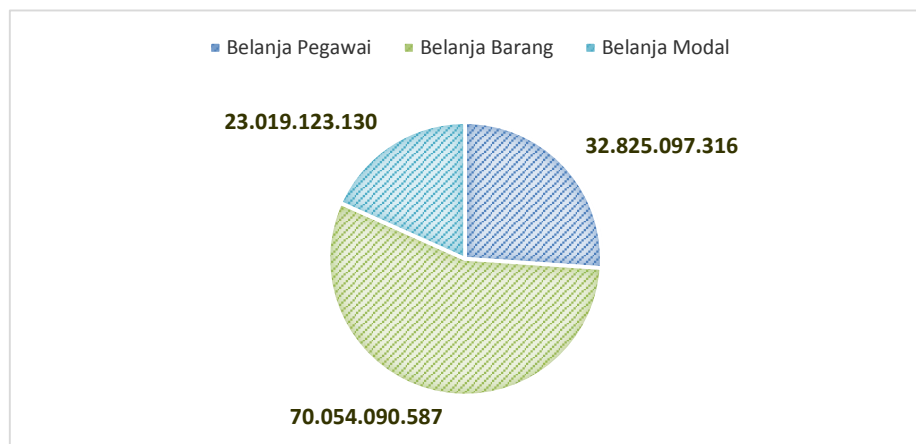
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Audited TA 2018

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	34.749.826.000	32.825.097.316	94,46%
Belanja Barang	87.201.906.000	70.054.090.587	80,34%
Belanja Modal	24.023.886.000	23.019.123.130	95,82%
Total	145.975.618.000	125.898.311.033	86,25%

Komposisi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk TA 2018 sebagaimana tampak pada tabel 9 dan dapat digambarkan pada grafik 3 berikut:

Grafik 3

Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Audited TA 2018



Realisasi belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan per kegiatan yang dilaksanakan pada Audited Tahun Anggaran 2018 disajikan dalam tabel 10 berikut:

Tabel 10

Realisasi Belanja Per Kegiatan Audited TA 2018

KODE	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1687	Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah	12.658.969.000	11.394.686.261	90,01%
1688	Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	4.494.937.000	3.322.856.637	73,92%
1689	Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD	9.482.931.000	7.296.957.173	76,95%
1690	Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah	21.428.718.000	16.269.699.274	75,92%
1691	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	97.910.063.000	87.614.111.688	89,48%
TOTAL		145.975.618.000	125.898.311.033	86,25%

Realisasi belanja pegawai

Rp32.836.096,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Audited TA 2018 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja Lembur

Realisasi Belanja Pegawai Audited TA 2018 adalah sebesar Rp32.836.096.543,00 atau 94,49 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2018 sebesar Rp34.749.826.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Audited TA 2017, realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp4.087.585.554,00 atau 14,22 persen.

Rincian Belanja Pegawai Audited TA 2018 dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 11

Realisasi Belanja Pegawai Audited TA 2018

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	33.800.626.000	32.444.440.543	95,99%
Belanja Lembur	949.200.000	391.656.000	41,26%
Total	34.749.826.000	32.836.096.543	94,49%

Perbandingan antara realisasi belanja pegawai 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12

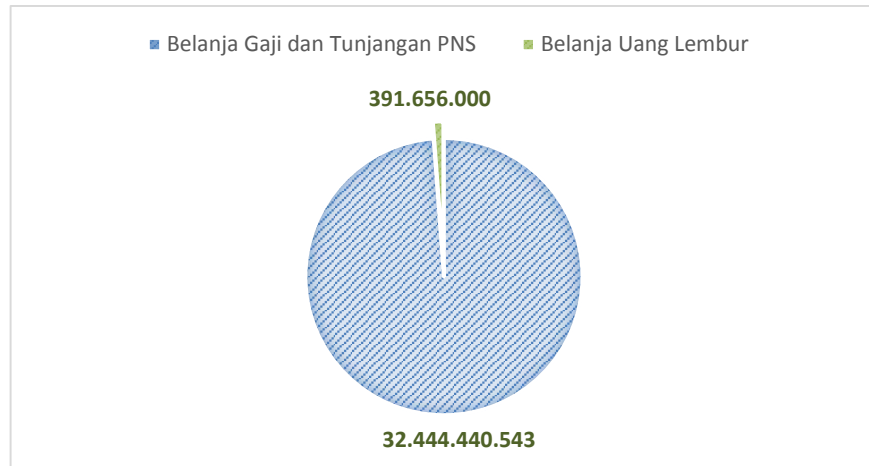
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Uraian	AUDITED TA 2018	AUDITED TA 2017	Kenaikan / Penurunan	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	32.444.440.543	27.995.514.989	4.448.925.554	15,89%
Belanja Lembur	391.656.000	752.996.000	-361.340.000	-47,99%
Jumlah Belanja Bruto	32.836.096.543	28.748.510.989	4.087.585.554	14,22%
Pengembalian Belanja	10.999.227	72.471.771	-61.472.544	-84,82%
Jumlah Belanja Netto	32.825.097.316	28.676.039.218	4.149.058.098	14,47%

Komposisi Belanja Pegawai Audited TA 2018 dapat digambarkan dalam Grafik 4 berikut.

Grafik 4

Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Audited TA 2018



Perbandingan persentase realisasi belanja pegawai Audited TA 2018 sampai dengan TA 2018 dapat dilihat pada Tabel 13 dan grafik 5 berikut:

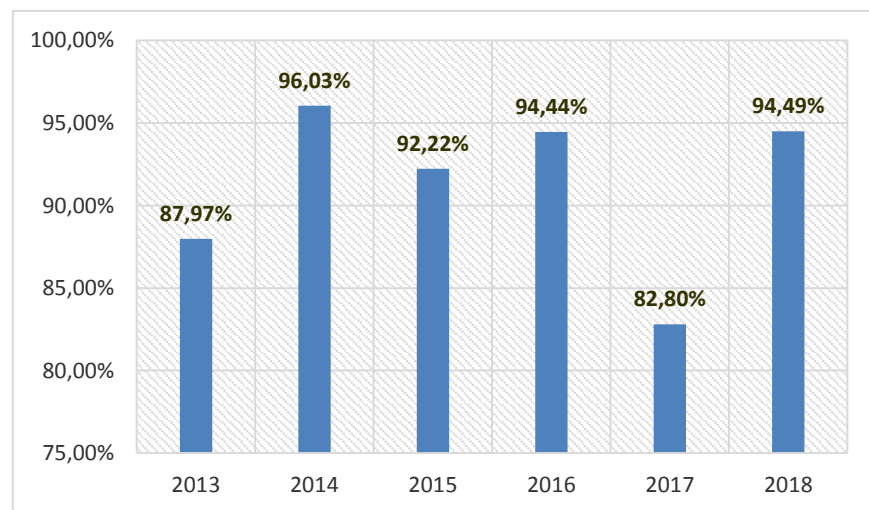
Tabel 13

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Audited TA 2013 s.d. 2018

Tahun	Pagu	Realisasi (Rp)	%
2013	26.471.459.000	23.287.897.850	87,97%
2014	25.549.693.000	24.534.563.500	96,03%
2015	29.226.711.000	26.953.010.980	92,22%
2016	30.303.861.000	28.618.679.974	94,44%
2017	34.632.363.000	28.676.039.218	82,80%
2018	34.749.826.000	32.836.096.543	94,49%

Grafik 5

Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Pegawai Audited 2013 s.d. 2018



B.2.2. Belanja Barang

Realisasi belanja barang

Rp70.812.033.263,00

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang Audited TA 2018 adalah sebesar Rp70.812.033.263,00 yang berarti 81,2 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2018 sebesar Rp87.201.906.000,00. Apabila dibandingkan dengan Audited TA 2017, realisasi Belanja Barang Audited TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp4.160.551.716,00 atau 14,03 persen.

Persentase realisasi belanja barang terhadap pagu belanja barang TA 2018 mengalami penurunan dari 84,36 persen di tahun 2017 menjadi 81,20 persen di 31 Desember 2018.

Rincian Belanja Barang TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 14

Realisasi Belanja Barang Audited TA 2018

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	8.548.343.000	7.193.177.208	84,15%
Belanja Barang Non Operasional	15.765.741.000	11.255.361.488	71,39%
Belanja Barang Persediaan	2.236.928.000	1.640.577.278	73,34%
Belanja Jasa	10.945.214.000	10.074.315.410	92,04%
Belanja Pemeliharaan	10.628.055.000	7.562.232.837	71,15%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	39.077.625.000	33.086.369.042	84,67%
Total	87.201.906.000	70.812.033.263	81,20%

Perbandingan antara realisasi Belanja Barang Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 dapat dilihat pada Tabel 15

Tabel 15

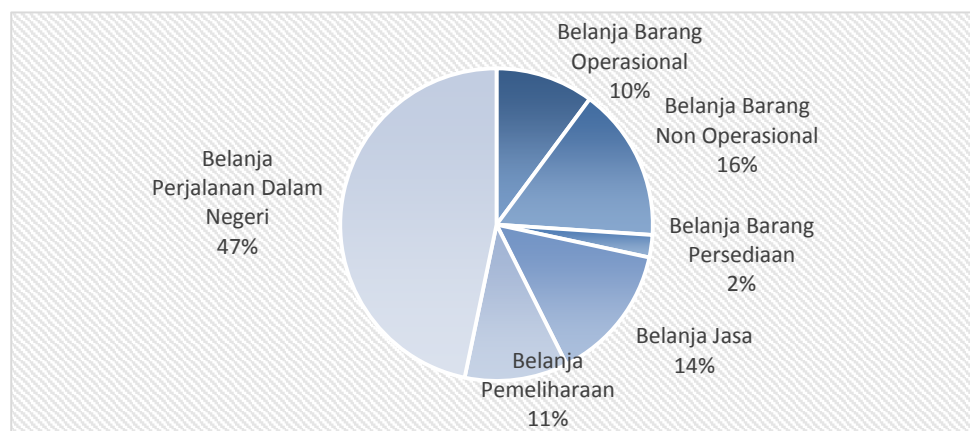
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Uraian	AUDITED 2018	AUDITED 2017	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Barang Operasional	7.193.177.208	3.362.516.229	3.830.660.979	113,92%
Belanja Barang Non Operasional	11.255.361.488	10.258.259.381	997.102.107	9,72%
Belanja Barang Persediaan	1.640.577.278	2.343.905.237	-703.327.959	-30,01%
Belanja Jasa	10.074.315.410	6.515.180.432	3.559.134.978	54,63%
Belanja Pemeliharaan	7.562.232.837	10.696.022.090	-3.133.789.253	-29,30%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	33.086.369.042	28.925.817.326	4.160.551.716	14,38%
Jumlah Belanja Bruto	70.812.033.263	62.101.700.695	8.710.332.568	14,03%
Pengembalian Belanja	757.942.676	447.940.780	310.001.896	69,21%
Jumlah Belanja Netto	70.054.090.587	61.653.759.915	8.400.330.672	13,63%

Komposisi Belanja Barang TA 2018 dapat digambarkan dalam grafik 6.

Grafik 6

Komposisi Realisasi Belanja Barang Audited TA 2018



Perbandingan persentase realisasi belanja barang Audited TA 2018 sampai dengan 2017 dan Audited TA 2018 dapat dilihat pada Tabel 16 dan grafik 7 berikut:

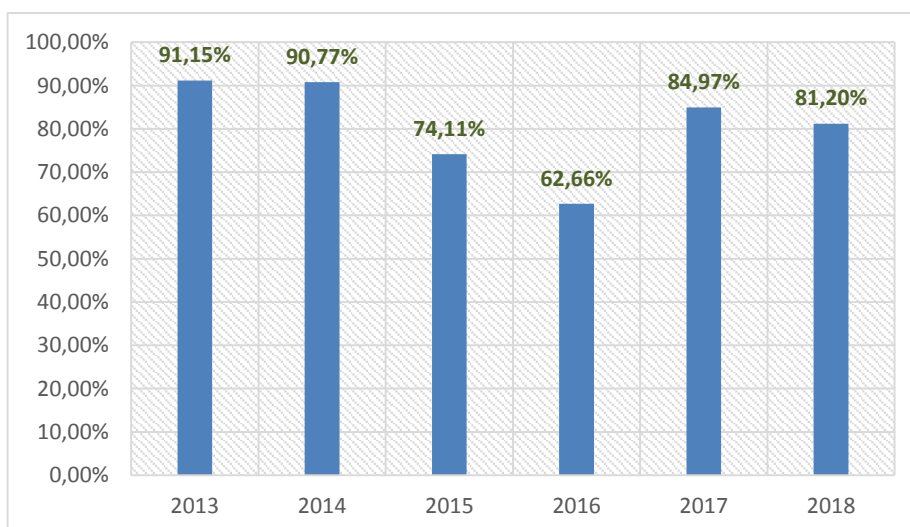
Tabel 16

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Audited TA 2013 s.d. 2018

Tahun	Pagu	Realisasi (Rp)	%
2013	84.642.068.000	77.997.690.157	92,15%
2014	48.877.295.000	44.364.533.066	90,77%
2015	119.249.206.000	88.375.513.725	74,11%
2016	88.434.043.000	55.410.492.619	62,66%
2017	73.087.438.000	62.101.700.695	84,97%
2018	87.201.906.000	70.812.033.263	81,20%

Grafik 7

Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Barang Audited TA 2013 s.d. 2018



Realisasi belanja modal

Rp23.019.123.130,00

B.2.3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Realisasi Belanja Modal Audited TA 2018 adalah sebesar Rp23.019.123.130,00 atau 95,82 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Audited TA 2018 sebesar Rp24.023.886.000,00. Apabila dibandingkan dengan Audited TA 2017, realisasi Belanja Modal Audited TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp3.467.838.085,00 atau 17,74 persen.

Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 17

Realisasi Belanja Modal Audited TA 2018

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal & Mesin	11.154.887.000	10.673.546.847	95,68%
Bel. Modal Gedung & Bangunan	0	0	0,00%
Belanja Modal Lainnya	12.868.999.000	12.345.576.283	95,93%
Total	24.023.886.000	23.019.123.130	95,82%

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 18 berikut.

Tabel 18

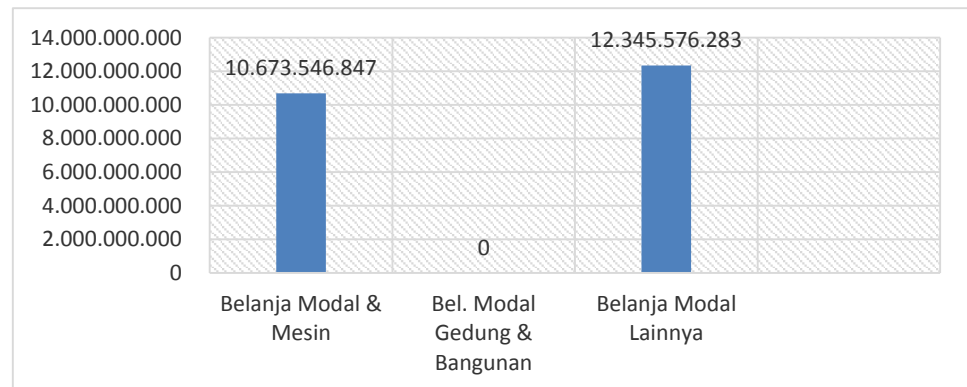
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Uraian	AUDITED 2018	AUDITED 2017	Kenaikan / (Penurunan)	%
B. Modal Peralatan dan Mesin	10.673.546.847	12.831.909.121	-2.158.362.274	-16,82%
B. Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0,00%
Belanja Modal Lainnya	12.345.576.283	6.719.375.924	5.626.200.359	0,00%
Jumlah Belanja Bruto	23.019.123.130	19.551.285.045	3.467.838.085	17,74%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Netto	23.019.123.130	19.551.285.045	3.467.838.085	17,74%

Komposisi Belanja Modal TA 2018 dapat digambarkan dalam grafik 8.

Grafik 8

Komposisi Realisasi Belanja Modal Audited TA 2018



Perbandingan persentase realisasi belanja modal Audited TA2018 sampai dengan TA 2018 dapat dilihat pada Tabel 19 dan grafik 9 berikut:

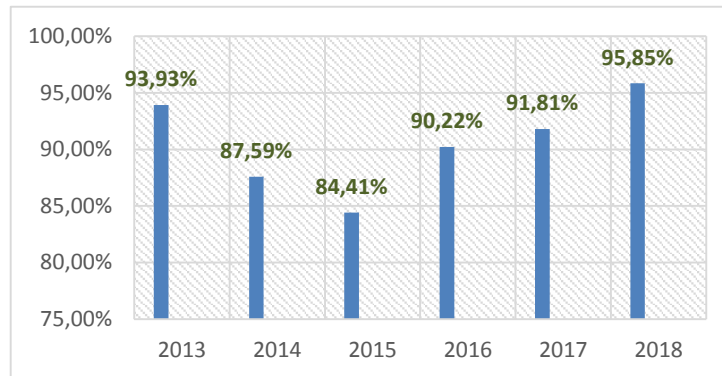
Tabel 19

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Audited 2013 s.d. 2018

Tahun	Pagu	Realisasi (Rp)	%
2013	10.624.563.000	9.979.859.417	93,93%
2014	4.016.543.000	3.518.035.973	87,59%
2015	16.687.402.000	14.085.066.525	84,41%
2016	1.515.066.000	6.622.520.406	90,22%
2017	21.295.295.000	19.551.285.045	91,81%
2018	24.073.886.000	23.019.123.130	95,85%

Grafik 9

Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Modal Audited TA 2013 s.d 2018



B.2.4. Pengembalian Belanja Negara

Pengembalian Belanja adalah penerimaan kembali dari kelebihan pembayaran yang telah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang menjadi hak negara dan harus disetor ke Kas Umum Negara. Pengembalian Belanja tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun dengan alasan apapun dan harus disetor ke Kas Negara pada bulan berkenaan.

Pengembalian Belanja berasal dari ketiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Pengembalian Belanja dibukukan sesuai dengan akun belanjanya.

Realisasi Pengembalian Belanja per Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 yaitu sebesar Rp768.941.903,00 dan Rp519.842.551,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp249.099.352,00 atau 47,9 persen.

Pengembalian belanja per Audited TA 2018 berasal dari Pengembalian belanja pegawai sebesar Rp10.999.227,00 dan pengembalian belanja barang sebesar Rp757.942.676,00.

Pengembalian
Belanja
Rp768.941.903,00

Tabel 20

Perbandingan Realisasi Pengembalian Belanja Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Akun	Uraian Pengembalian	AUDITED TA 2018	AUDITED TA 2017	Selisih
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.999.227,00	72.471.771,00	-61.472.544,00
5122	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengembalian Belanja Pegawai		10.999.227,00	72.471.771,00	-61.472.544,00
5211	Belanja Honor Operasional	0,00	570.000,00	-570.000,00
5212	Belanja Barang Non Operasional	420.000,00	3.576.300,00	-3.156.300,00
5218	Belanja Persediaan	0,00	0,00	0,00
5221	Belanja Jasa	2.852.500,00	285.000,00	2.567.500,00
5231	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	-
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	754.670.176,00	443.509.480,00	311.160.696,00
Jumlah pengembalian Belanja Barang		757.942.676,00	447.370.780,00	310.571.896,00
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
5361	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengembalian Belanja Modal		0,00	0,00	0,00
Total		768.941.903,00	519.842.551,00	249.099.352,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Perbandingan Neraca Audited TA 2018 dan 31 Desember 2017

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Perbandingan Neraca Per Audited TA 2018 dan Audited 2017 disajikan pada Tabel 21 berikut ini:

Tabel 21

Perbandingan Neraca Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Perkiraan	Audited TA 2018	Audited TA 2017	Kenaikan/(Penurunan)
Aset	38.777.681.234	24.312.444.535	14.465.236.699
Kewajiban	136.800.920	56.899.227	79.901.693
Ekuitas	38.640.880.314	24.255.545.308	14.385.335.006

Penjelasan setiap pos-pos dalam Neraca sebagai berikut:

C.1 ASET

Aset Rp38.777.183.576,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang.

Nilai Aset per Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 masing-masing sebesar Rp38.777.681.234,00 dan Rp24.312.444.535,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.465.236.699,00 atau 59,50 persen.

Tabel 22

Perbandingan Nilai Aset Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Audited TA 2018	Audited 2018	Kenaikan/Penurunan	Persen
38.777.681.234,00	24.312.444.535,00	14.465.236.699,00	59,50%

Rincian Aset per Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23

Rincian Aset per Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Perkiraan	Audited 2018	Audited 2017	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	1.669.447.837	2.258.890.806	(589.442.969)	-26,09%
Aset Tetap	35.756.025.077	21.838.093.144	13.917.931.933	63,73%
Aset Lainnya	1.352.208.320	215.460.585	1.136.747.735	527,59%
Jumlah Aset	38.777.681.234	24.312.444.535	14.465.236.699	59,50%

C.1. 1 ASET LANCAR

C.1.1.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak

Rp55.254.165,00

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang timbul dari pungutan pendapatan Negara selain Pajak.

Nilai Piutang Bukan Pajak per Audited TA 2018 dan Audited 2017 masing-masing sebesar Rp55.254.165,00 dan Rp50.733.906,00. Pada TA 2018 mengalami kenaikan senilai Rp4.520.259,00 yang berasal dari pendapatan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan meubelair PT Pentas Menara Komindo yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24

Data Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Klasifikasi Piutang	Debitor	Saldo Awal	Perubahan (+/-)	Saldo Akhir 31 Desember 2018	Pegolongan				Nilai Agunan Barang Sitaan
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
PNBP	PT Aek Sibundong Nauli	39.785.106	-	39.785.106	-	-	-	39.785.106	-
	PT Sanjaya Wiratama	10.948.800	-	10.948.800	-	-	-	10.948.800	-
	PT Pentas Menara Komindo	4.520.259	-	4.520.259	4.520.259	-	-	-	-
Jumlah Total		55.254.165	-	55.254.165	4.520.259	-	-	50.733.906	-

Penyelesaian piutang bukan pajak PT Aek Sibundong Nauli dan PT Sanjaya Wiratama telah diserahkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenkeu untuk diteruskan kepada PUPN/DJKN melalui surat Nomor S-161/MK.1/2014 tanggal 24 Februari 2014. Sedangkan piutang PT Pentas Menara Komindo dibayar dan dilunasi pada Januari 2019.

C.1.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Rp50.756.507,00

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per tanggal Audited TA 2018 dan Audited 2017 masing-masing sebesar Rp50.756.507,00 dan Rp50.733.906,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Audited TA 2018 merupakan nilai penyisihan atas Piutang Bukan Pajak sebesar nilai piutang macet PT. Aek Sibudong Nauli dan PT Sanjaya Wiratama senilai Rp50.733.906,00 dan piutang lancar PT. Penatas Menara Komindo Rp22.601,00.

C.1.1.5. Persediaan

Persediaan
Rp1.664.950.179,00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar berupa Persediaan menggunakan data yang berasal dari hasil stock opname Persediaan per Audited TA 2018 sesuai dengan Berita Acara Inventarisasi (Opname Fisik) Barang Persediaan Nomor: BA-5/PK.133/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah Persediaan per Audited TA 2018 dan Audited 2017 masing-masing sebesar Rp1.664.950.179,00 dan Rp2.258.890.806,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian saldo persediaan per Audited TA 2018 dan Audited 2017 per jenis persediaan dapat dilihat pada tabel 25 berikut.

Tabel 25

Rincian Persediaan Per Audited TA 2018 dan 31 Desember 2017

Akun	Uraian	Audited 2018	Audited 2017	Kenaikan/ Penurunan
117111	Barang Konsumsi	1.588.625.314	2.203.056.576	-614.431.262
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	76.324.865	55.834.230	20.490.635
	Total	1.664.950.179	2.258.890.806	-593.940.627

C.1.2. ASET TETAP

Aset Tetap
Rp35.756.025.077,00

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jumlah Aset Tetap Per Audited TA 2018 dan Audited 2017 masing-masing sebesar Rp35.756.025.077,00 dan Rp21.838.093.144,00 dan yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian aset tetap menurut jenis aset tetap dapat dilihat pada tabel 26 dan grafik 10 berikut.

Tabel 26

Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset

No.	Uraian	Unaudited TA 2018	Audited TA 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Peralatan dan Mesin	100.841.547.680	93.840.931.062	7.000.616.618	7,46%
2	Gedung dan Bangunan	899.754.000	0	899.754.000	100,00%
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	990.851.337	990.851.337	0	0,00%
4	Aset Tetap Lainnya	11.732.950.373	789.445.090	10.943.505.283	1386,23%
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.956.000	0	20.956.000	100,00%
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-78.322.397.715	-73.440.302.129	-4.882.095.586	6,65%
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-35.516.604	0	-35.516.604	100,00%
8	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-372.119.994	-342.832.216	-29.287.778	8,54%
Jumlah		35.756.025.077	21.838.093.144	13.917.931.933	63,73%

Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK-BMN dapat dilihat pada tabel 27 berikut:

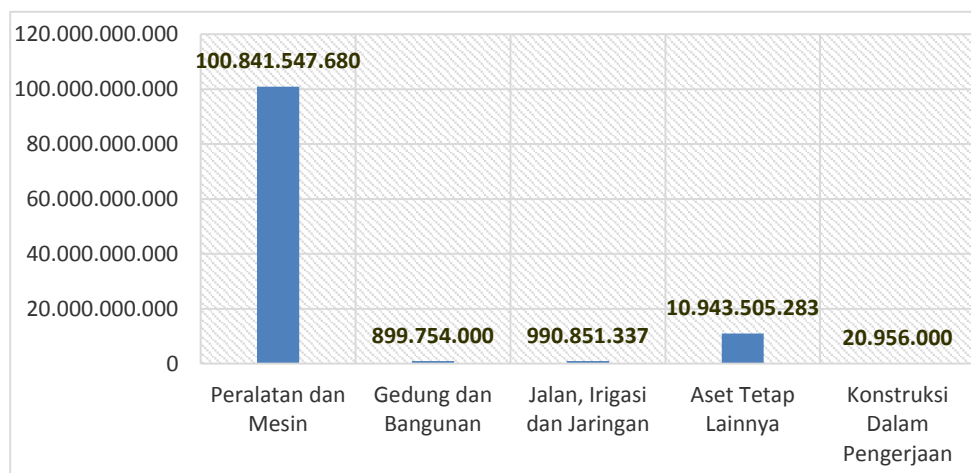
Tabel 27

Daftar Perbandingan Aset Tetap Antara Neraca dan SIMAK-BMN per Audited TA 2018

No	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca	Aset Tetap dalam SIMAK	Kenaikan / Penurunan
1	Peralatan dan Mesin	100.841.547.680	100.841.547.680	0
2	Gedung dan Bangunan	899.754.000	899.754.000	0
2	Jaringan	990.851.337	990.851.337	0
	Aset Tetap Renovasi	10.943.505.283	10.943.505.283	0
4	Aset Tetap Lainnya	789.445.090	789.445.090	0
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.956.000	20.956.000	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(78.322.397.715)	(78.322.397.715)	0
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(35.516.604)	(35.516.604)	0
8	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(372.119.994)	(372.119.994)	0
Jumlah		35.756.025.077	35.756.025.077	0

Grafik 10

Komposisi Aset Tetap



C.1.2.1. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin
Rp100.841.547.680,00*

Jumlah Peralatan dan Mesin per Audited TA 2018 dan Audited 2017 masing-masing sebesar Rp100.841.547.680,00 dan Rp93.840.931.062,00. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp7.000.616.618,00 atau 7,46 persen.

Tabel 28

Perbandingan Posisi Peralatan dan Mesin

Uraian	Audited 2018	Audited 2017	Kenaikan / Penurunan	%
Peralatan dan Mesin	100.841.547.680	93.840.931.062	7.000.616.618	7,46
Jumlah	100.841.547.680	93.840.931.062	7.000.616.618	7,46

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.673.546.847,- terdiri dari pembelian Mobil Sedan, Mini Bus, PC, Laptop, Meubelair, dan barang lainnya sejumlah Rp7.251.455.877,- pengembangan langsung Rp93.470.700,- merupakan honor PPHP dan Pokja dan Penyelesaian dengan KDP Rp3.328.620.270,- yang terdiri dari 5 unit mini bus operasional dan sebagian meubelair.

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin berasal dari Penghentian Peralatan dan Mesin sesuai dengan SKET-6/PK.1/2018 tanggal 17 April 2018, SKET-65/PK.1/2018 tanggal 25 September 2018, dan SKET-66/PK.1/2018 tanggal 31 Desember 2018 .

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin dapat disajikan pada tabel 29 berikut.

Tabel 29

Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin

Saldo Awal 1 Januari 2018	93.840.931.062
Mutasi Tambah	10.673.546.847
Pembelian	7.251.455.877
Pengembangan Langsung	93.470.700
Penyelesaian dengan KDP	3.328.620.270
Mutasi Kurang	3.672.930.229
Penghentian Aset dari Penggunaan	3.672.930.229
Saldo 30 September 2018	100.841.547.680
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	78.322.397.715
Saldo 31 Desember 2018	22.519.149.965

C.1.2.2. Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp990.851.337,00*

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per Audited TA 2018 dan Audited 2017 masing-masing sebesar Rp990.851.337,00 dan Rp990.851.337,00 yang merupakan aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan. Nilai pos Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari nilai akun Jaringan di awal tahun 2018 dan tidak ada penambahan ataupun pengurangan sehingga nilainya sama dengan neraca per Audited 2017.

C.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp899.754.000,00

Jumlah Gedung dan Bangunan per Audited TA 2018 dan Audited 2017 masing-masing sebesar Rp899.754.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan seluruh Gedung dan Bnagunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasiaonal pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pada DJPK, Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah aset berupa rumah dinas yang diperoleh dari transfer masuk Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima BMN Nomor BAST-40/SJ.8/2018 tanggal 3 Juli 2018.

C.1.2.3. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp11.732.950.373,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya per Audited TA 2018 dan Audited 2017 masing-masing sebesar Rp11.732.950.373,00 dan Rp789.445.090,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigas dan jaringan. Nilai pos Aset Tetap Lainnya berasal dari nilai akun Aset Tetap Lainnya di awal tahun 2018 dan tidak ada penambahan ataupun pengurangan sehingga nilainya sama dengan neraca per Audited 2017.

Tabel 30

Perbandingan Posisi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Audited TA 2018	Audited TA 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap Lainnya	11.732.950.373	789.445.090	10.943.505.283	1386,23%
Jumlah	11.732.950.373	789.445.090	10.943.505.283	14

C.1.2.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp20.956.000,00

Jumlah Kontruksi Dalam Pengerjaan per Audited TA 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah masing-masing Rp20.956.000,00 dan Rp0,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Audited TA 2018 tersaji sebagai berikut:

Tabel 31

Rincian Konstuksi Dalam Pengerjaan

No	Aset Tetap	Nilai
1.	Perolehan KDP	20.956.000
	Total	20.956.000

C.1.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
-Rp78.730.034.313,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Audited TA 2018 dan Audited 2017 adalah masing-masing -Rp78.730.034.313,00 dan -Rp73.783.134.345,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Audited TA 2018 tersaji sebagai berikut:

Tabel 32

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	100.841.547.680	78.322.397.715	22.519.149.965
2	Gedung dan Bangunan	899.754.000	35.516.604	864.237.396
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	990.851.337	372.119.994	618.731.343
Total		102.732.153.017	78.730.034.313	24.002.118.704

C.1.3. ASET LAINNYA

Aset Lainnya
Rp1.352.208.320,00

Jumlah Aset Lainnya Per Audited TA 2018 dan Audited 2017 masing-masing sebesar Rp1.352.208.320,00 dan Rp215.460.585,00. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp1.352.208.320,00 atau 527,59 persen.

Tabel 33

Perbandingan Posisi Aset Lainnya per Audited 2018 dan Audited TA 2017

Uraian	Audited 2018	Audited 2017	Kenaikan / Penurunan	%
Aset Lainnya	1.352.208.320	215.460.585	1.136.747.735	527,59
Jumlah	1.352.208.320	215.460.585	1.136.747.735	527,59

C.1.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp3.239.813.385,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada DJPK berupa software dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Jumlah Aset Tak Berwujud Per Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 masing-masing sebesar Rp3.239.813.385,00 dan Rp1.858.698.385,00 . Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp1.381.115.000,00 atau 74,31 persen.

Tabel 34

Perbandingan Aset Tak Berwujud Per Audited 2018 dan Audited TA 2017

Uraian	Audited TA 2018	Audited TA 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Software	3.100.103.485	1.718.988.485	1.381.115.000	80,34
Lisensi	139.709.900	139.709.900	0	0,00
Jumlah	3.239.813.385	1.858.698.385	1.381.115.000	74,31

Mutasi/perubahan Aset Tak Berwujud disajikan pada table di bawah :

Tabel 35

Mutasi/ Perubahan Aset Tak Berwujud

Saldo Awal per 31 Desember 2017	1.858.698.385
Mutasi Tambah	1.381.115.000
Belanja Aset Tak Berwujud	1.381.115.000
Mutasi Kurang	0
Saldo Akhir	3.239.813.385
Akumulasi Amortisasi Aset Takberwujud	1.560.711.640
Nilai Buku Per 31 Desember 2018	1.679.101.745

Terdapat mutasi tambah berasal dari belanja modal Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.381.115.000,00 yang terdiri dari 13 Unit Software komputer sebagai berikut:

Tabel 36

Mutasi Tambah Aset Takberwujud

Kode Barang / NUP	Nama Barang	Nilai Perolehan	Keterangan
8010101001 / 22	Software Komputer	81.000.000,00	Template Website DJPK
8010101001 / 23	Software Komputer	80.000.000,00	Modul Kualitas Data Administrasi Database
8010101001 / 24	Software Komputer	227.315.000,00	Aplikasi Call Center
8010101001 / 25	Software Komputer	142.000.000,00	Modul Layanan System SIKD Executive
8010101001 / 26	Software Komputer	194.000.000,00	Modul Pengembangan LKPD secara Elektronik
8010101001 / 27	Software Komputer	95.000.000,00	Modul Pengembangan Sinergi
8010101001 / 28	Software Komputer	80.000.000,00	Pengembangan SIKD Core
8010101001 / 29	Software Komputer	103.800.000,00	Sistem Pengembangan Pegawai
8010101001 / 30	Software Komputer	142.000.000,00	Monitoring Trend Keuangan
8010101001 / 31	Software Komputer	49.500.000,00	Modul Keamanan Jaringan
8010101001 / 32	Software Komputer	139.000.000,00	Aplikasi Perencanaan Anggaran
8010101001 / 33	Software Komputer	26.500.000,00	Modul Penyiapan data Konsolidasi
8010101001 / 34	Software Komputer	21.000.000,00	Modul Interkoneksi Perbankan
TOTAL		1.381.115.000,00	

Tabel 37

Daftar Perbandingan Aset Tak Berwujud Antara Modul GLP dan Modul Aset per Audited TA 2018

Uraian	SAKTI GLP	SAKTI ASET	Kenaikan/ (Penurunan)
Software	3.100.103.485	3.100.103.485	0
Lisensi	139.709.900	139.709.900	0
Jumlah	3.100.103.485	3.100.103.485	0

C.1.3.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp2.312.311.377,00

Jumlah Aset Lain-lain Per Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 masing-masing sebesar Rp2.312.638.761,00 dan Rp1.934.248.104,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional DJPK serta telah dilakukan usul penghapusan dari BMN sesuai Surat Seditjen PK nomor S-374/PK.1/2018 tanggal 17 April 2018.

Aset lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Tabel 38

Perbandingan Posisi Aset Lain-Lain

Uraian	Audited 2018	Audited 2017	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.888.839.737	1.510.449.080	378.390.657
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	423.799.024	423.799.024	0
Total	2.312.638.761	1.934.248.104	378.390.657

Mutasi/perubahan Aset Lain-lain disajikan pada tabel berikut :

Tabel 39

Mutasi/ Perubahan Aset Lain-lain

Saldo Awal per 31 Desember 2017	1.934.248.104
Mutasi Tambah	3.672.930.229
Penghentian aset tetap pemerintah	3.672.930.229
Mutasi Kurang	3.294.539.572
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang Dihentikan)	3.294.539.572
Saldo Akhir	2.312.638.761
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain	2.312.638.761
Nilai Buku Per 31 Desember 2018	0

Terdapat mutasi tambah berupa penghentian aset tetap pemerintah sebesar Rp3.572.930.229,00 yang terdiri dari:

1. Penghentian 690 unit barang rusak berat sejumlah Rp.2.799.473.229 sesuai dengan Surat Keterangan Sekretaris Dijen Perimbangan Keuangan nomor KET-6/PK.1/2018 tanggal 17 April 2018;
2. Penghentian 1 unit Sedan sejumlah Rp486.600.000 sesuai dengan Surat Keterangan Sekretaris Dijen Perimbangan Keuangan nomor KET-18/PK.1/2018 tanggal 18 April 2018;
3. Penghentian 2 unit Mini Bus sejumlah Rp373.000.000 sesuai dengan Surat Keterangan Sekretaris Dijen Perimbangan Keuangan nomor KET-65/PK.1/2018 tanggal 25 September 2018; dan
4. Penghentian 1 unit Sepeda Motor sejumlah Rp13.857.000 sesuai dengan Surat Keterangan Sekretaris Dijen Perimbangan Keuangan nomor KET-66/PK.1/2018 tanggal 31 Desember 2018 .

Terdapat mutasi kurang berupa Persetujuan usulan penghapusan BMN sebesar Rp3.294.539.572 yang terdiri dari:

1. Persetujuan Usul Penghapusan 689 Unit BMN Rusak Berat sejumlah Rp 2.807.939.572 sesuai dengan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor S-731/SJ.8/2018 tanggal 8 Mei 2018 hal Persetujuan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada DJPK.
2. Persetujuan Usul Penghapusan 1 Unit Sedan sejumlah Rp486.600.000 sesuai dengan Surat Kepala KPKNL Jakarta II Nomor S-214/MK.6/WKN.07/2018 tanggal 6 Agustus hal Persetujuan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan tanpa melalui lelang Pada DJPK.

Tabel 40

Daftar Perbandingan Aset Lain-lain Antara Modul GLP dan Modul Aset per Audited TA 2018

Uraian	SAKTI GLP	SAKTI ASET	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.888.839.737	1.888.839.737	0	0,00
Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	423.799.024	423.799.024	0	0,00
Jumlah	1.888.839.737	1.888.839.737	0	0,00

C.2. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.2.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp136.800.920,00

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per Audited TA 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp136.800.920,00 dan Rp56.899.227,00. Saldo tersebut merupakan saldo kewajiban kepada pegawai dan pihak ketiga lainnya pada Audited TA 2018 yang belum dibayarkan.

Tabel 41

Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga

Audited 2018	Audited 2017	Kenaikan/ (Penurunan)
136.800.920	56.899.227	79.901.693

Nilai utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2018 terdiri dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayarkan (212111) sebesar Rp136.800.920,00,.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBPN
Rp94.847.744,00

Jumlah Pendapatan PNBPN untuk periode yang berakhir pada Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 adalah sebesar Rp94.847.744,00 dan Rp88.401.206,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.446.538,00. Rincian PNBPN disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 42

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Uraian	Audited TA 2018	Audited TA 2017	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Penjualan Lainnya	0	1.150.000	(1.150.000)	0%
Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah	58.847.744	87.010.820	(28.163.076)	47,86%
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	36.000.000	0	36.000.000	100%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan	0	240.386	(240.386)	0%
Jumlah	94.847.744	88.401.206	6.446.538	100%

Pendapatan Operasional berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang berasal dari Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp32.904.999.009,00

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai pada Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp32.904.999.009,00 dan Rp28.650.787.351,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.254.211.658,00 atau 14,85 persen.

Rincian Beban Pegawai disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 43

Rincian Beban Pegawai Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Uraian Jenis Beban	Audited 2018	Audited 2017	NAIK (TURUN)%
Beban Gaji Pokok PNS	22.707.149.390	19.717.192.580	15,16%
Beban Pembulatan Gaji PNS	352.518	289.923	21,59%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.530.736.292	1.400.688.730	9,28%
Beban Tunj. Anak PNS	472.501.523	428.205.474	10,34%
Beban Tunj. Struktural PNS	1.420.830.000	1.344.175.000	5,70%
Beban Tunj. Fungsional PNS	738.305.000	398.160.000	85,43%
Beban Tunj. PPh PNS	42.429.066	70.870.305	-40,13%
Beban Tunj. Beras PNS	1.201.810.220	1.103.825.640	8,88%
Beban Uang Makan PNS	3.463.761.000	2.772.434.811	24,94%
Beban Tunj. Umum PNS	931.410.000	659.358.888	41,26%
Beban Uang Lembur	395.714.000	755.586.000	-47,63%
Jumlah	32.904.999.009	28.650.787.351	14,85%

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp2.258.173.169,00

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jumlah Beban Persediaan pada Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.258.173.169,00 dan Rp2.153.428.740,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp104.744.429,00 atau 4,86 persen.

Tabel 44

Rincian Beban Persediaan Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Uraian Jenis Beban	Audited TA 2018	Audited TA 2017	NAIK (TURUN)%
Beban Persediaan Konsumsi	2.258.173.169	2.153.428.740	4,86%
Jumlah	2.258.173.169	2.153.428.740	4,86%

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp31.574.187.583,00

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Jumlah Beban Jasa pada Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp31.574.187.583,00 dan Rp31.409.600.897,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp164.586.686,00 atau 0,53 persen.

Rincian Beban Jasa untuk Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 45

Rincian Beban Jasa Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Uraian Jenis Beban	Audited TA 2018	Audited TA 2017	%
Beban Keperluan Perkantoran	4.736.036.665	817.412.944	100%
Beban Pengiriman Surat Dinas dan Pos Pusat	725.617.000	596.792.100	21,59%
Beban Honor Operasional Satker	754.290.000	748.600.000	0,76%
Beban Barang Operasional Lainnya	977.233.543	1.199.141.185	-18,51%
Beban Bahan	7.748.168.048	6.144.471.885	26,10%
Beban Honor Output Kegiatan	2.582.990.000	3.758.547.500	-31,28%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	852.151.440	351.663.696	142,32%
Beban Langganan Telepon	185.522.109	89.321.722	107,70%
Beban Jasa Konsultan	3.665.237.977	11.686.344.585	100,00%
Beban Sewa	2.582.333.687	1.332.448.295	93,80%
Beban Jasa Profesi	3.843.847.500	3.212.736.961	19,64%
Beban Jasa Lainnya	2.920.759.614	1.472.120.024	98,40%
Jumlah	31.574.187.583	31.409.600.897	0,52%

Sebagian besar dari nilai Beban Jasa Konsultan yakni sebesar Rp3.126.237.977,00 merupakan beban jasa atas adanya hibah luar negeri program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan dari Pemerintah Australia dengan nomor register hibah 2VBMK3A setara AUD.

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp7.618.858.802,00*

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal .

Beban Pemeliharaan Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.618.858.802,00 dan Rp10.717.190.548,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.098.331.746,00 atau 28,91 persen.

Rincian beban pemeliharaan Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 46

Rincian Beban Pemeliharaan Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Uraian Jenis Beban	Audited TA 2018	Audited TA 2017	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.709.683.235	7.292.265.140	-76,55%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.188.395.402	1.771.990.125	192,80%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	1.379.052.825	-100,00%
Beban Pemeliharaan Lainnya	85.107.000	252.714.000	-66,32%
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	56.625.965	21.168.458	167,50%
Belanja Pemeliharaan Jaringan	579.047.200	0	100,00%
Jumlah	7.618.858.802	10.717.190.548	-28,91%

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp32.331.698.866,00

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp32.331.698.866,00 dan Rp28.482.307.846,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.848.908.520,00 atau 13,51 persen.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Audited TA 2018 Audited TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 47

Rincian Beban Perjalanan Dinas Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Uraian Jenis Beban	Audited TA 2018	Audited TA 2017	NAIK (TURUN)%
Beban Perjalanan Biasa	12.488.031.799	10.825.452.069	15,36%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	650.201.000	492.370.000	32,06%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.614.970.479	10.140.939.900	14,54%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.578.495.588	7.023.545.877	7,90%
Jumlah	32.331.698.866	28.482.307.846	13,52%

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp8.805.762.583,00

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8.805.762.583,00 dan Rp6.217.885.641,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.587.876.942,00 atau 41,62 persen.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 48

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Audited TA 2018	Audited TA 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.520.268.672	6.117.076.312	39,29%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.838.868	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	29.287.778	14.643.889	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	8.561.395.318	6.131.720.201	39,62%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	244.367.265	86.071.940	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional	-	93.500	-
Jumlah Amortisasi	244.367.265	86.165.440	183,60%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	8.805.762.583	6.217.885.641	41,62%

D.8 Beban Penyisihan Piutang Taktertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Taktertagih
Rp22.601,00*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah beban penyisihan piutang PNBP, yang timbul dari penyisihan atas piutang lancar PT. Pentas Menara Komindo sebesar Rp22.601,00. Dalam hal ini, piutang PT. Pentas Menara Komindo digolongkan ke dalam piutang lancar sehingga disisihkan sebesar 5% dari nilai piutang.

D.9 Kegiatan Non Operasional

*Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp462.227.787,00*

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 49

Rincian Kegiatan Non Operasional Audited TA 2018 dan Audited TA 2017

Uraian	Audited TA 2018	Audited 2017
Kegiatan Non Operasional		
Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar	121.983.288	1.486.828.263
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	34.757.143	476.000
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	87.226.145	1.486.352.263
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	427.372.165	143.654.182
Beban Dari kegiatan Non Operasional Lainnya	52.370.523	84.305.780
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	375.001.642	59.348.402
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	462.227.787	1.545.700.665

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp121.983.288,00 berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berupa hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2018 dengan nomor NTPN 0DF5A5VGSKTT7KP9 tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp57.888.888,00 dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa mobil Camry sebesar Rp64.094.400,00.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp34.757.143,00 berasal dari kerugian pelpasan aset.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp427.372.165,00 berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp3.036.574,00, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp363.315.839,00, dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp61.019.752,00.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp52.370.523,00 berasal dari Beban Penyesuaian Nilai Persediaan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp24.255.545.308,00

Nilai ekuitas awal pada Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp24.255.545.308,00 dan Rp18.284.052.781,00. Nilai ekuitas awal berasal dari nilai ekuitas akhir pada 31 Desember 2017.

Tabel 50

Perbandingan Nilai Ekuitas Awal

Audited 2018	Audited 2017	Kenaikan/Penurunan
24.255.545.308,00	18.284.052.781,00	5.971.492.527,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp-
114.936.627.082,00

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 sebesar Rp-114.936.627.082,00 dan Rp-105.995.460.970,00.

Tabel 51

Perbandingan Surplus/Defisit LO

Audited 2018	Audited 2017	Kenaikan/Penurunan
-114.936.627.082,00	-105.995.460.970,00	-8.941.166.112

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/ Kesalahan*
Rp98.875.970,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 sebesar Rp98.875.970,00 dan Rp24.255.545.308,00.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar tersebut berasal dari adanya koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar Rp98.875.970,00. Koreksi tersebut berasal dari adanya penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu atas belanja modal renovasi Gedung Radius Prawiro TA 2017.

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Ekuitas*
Rp129.223.086.118,00

Transaksi antar Entitas pada Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 adalah sebesar Rp129.223.086.118,00 dan Rp111.966.953.497,00.

Tabel 52

Rincian Nilai Transaksi Antar Ekuitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-677.539.156
Ditagihkan ke Entitas Lain	125.898.311.033
Transfer Masuk	876.076.264
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	3.126.237.977
Jumlah	129.223.086.118

Transaksi pengesahan hibah langsung merupakan pengesahan MPHL-BJS program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan dari Pemerintah Australia dengan nomor register hibah 2VBMK3A sebesar AUD 294,835 atau setara Rp3.126.237.977,00

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp38.640.880.314,00

Nilai Ekuitas pada Audited TA 2018 dan Audited TA 2017 adalah sebesar Rp38.640.880.314,00 dan Rp24.255.545.308,00,00

Tabel 53

Perbandingan Nilai Ekuitas Akhir Audited 2018 dan Audited 2017

Audited TA 2018	Audited TA 2017	Kenaikan/Penurunan
38.640.880.314,00	24.255.545.308,00	14.385.335.006

LAPORAN KEUANGAN e-Rekon&LK

Neraca Percobaan AkruaI

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 440941KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGANTgl. Cetak 16/04/2019 11:23 AM
lap_neraca_percobaan_akruaI_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	55,254,165	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	50,756,507
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,588,625,314	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	76,324,865	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	100,841,547,680	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	899,754,000	0
0.0	134113	Jaringan	990,851,337	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	10,943,505,283	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	789,445,090	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	20,956,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	78,322,397,715
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	35,516,604
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	372,119,994
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	3,100,103,485	0
0.0	162161	Lisensi	139,709,900	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1,888,839,737	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	423,799,024	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,888,839,737
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,824,735,610
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	62,869,455
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	423,799,024
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	136,800,920
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	125,898,311,033
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	677,539,156	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	876,076,264

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 440941

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 16/04/2019 11:23 AM
lap_neraca_percobaan_akruai_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Beban Sewa	2,582,333,687	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,846,700,000	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	2,852,500
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,920,759,614	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,709,683,235	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,188,395,402	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	579,047,200	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	85,107,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	13,173,680,675	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	685,648,876
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	650,201,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11,628,650,479	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	13,680,000
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,633,836,888	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	55,341,300
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8,520,268,672	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11,838,868	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	29,287,778	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	230,396,275	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	13,970,990	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,258,173,169	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	56,625,965	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	52,370,523	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBK	22,601	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0
3.0	595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	34,757,143	0
JUMLAH			238,785,677,218	238,785,677,218

Neraca Percobaan Kas

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 440941

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 16/04/2019 11:23 AM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	20,077,306,967	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	677,539,156	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	23,587,354,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	424,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,631,648,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	472,699,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,427,121,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	725,170,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	123,864,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,427,293,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	3,466,080,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	938,973,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	949,200,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	5,557,723,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	808,008,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	869,880,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	1,312,732,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	11,687,171,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	3,166,480,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	912,090,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	2,236,928,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	240,000,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	549,000,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	2,693,182,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	4,324,450,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	3,138,582,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	2,073,990,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	6,623,914,000
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0
2.0	523133	Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	1,770,151,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	160,000,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	15,715,729,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	660,408,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	13,462,021,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	9,239,467,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	11,154,887,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	1,666,026,000
2.0	536121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	11,202,973,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 16/04/2019 11:23 AM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	36,000,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	64,094,400
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	57,888,888
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	54,327,485
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,036,574
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	363,315,839
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	98,875,970
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	22,689,918,420	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	2,677,000
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	360,379	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	6,227
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,528,988,482	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	471,968,799	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,425,500,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,430,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	717,960,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	775,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	43,474,983	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,201,737,480	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,430,822,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	3,881,000
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	933,710,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	2,230,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	391,656,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,736,036,665	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	725,617,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	754,290,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	977,233,543	0
3.0	521211	Belanja Bahan	7,820,220,048	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	420,000
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,582,990,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	852,151,440	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,640,577,278	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	185,522,109	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	539,000,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	2,582,333,687	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,846,700,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	2,852,500

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 16/04/2019 11:23 AM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	2,920,759,614	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,709,683,235	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,188,395,402	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	579,047,200	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	85,107,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	13,173,680,675	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	685,648,876
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	650,201,000	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11,628,650,479	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	13,680,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,633,836,888	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	55,341,300
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,673,546,847	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	1,381,115,000	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	10,964,461,283	0
JUMLAH			147,422,099,059	147,422,099,059

Laporan Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN 06
WILAYAH/PROVINSI : INSTANSI PUSAT 0199
SATUAN KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 440941

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 16/04/19 12:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2018				2017			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	677,539,156	(677,539,156)	0	0	1,727,983,827	(1,727,983,827)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	677,539,156	(677,539,156)	0	0	1,727,983,827	(1,727,983,827)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	34,749,826,000	32,825,097,316	1,924,728,684	94	34,632,363,000	28,676,039,218	5,956,323,782	83
	BELANJA BARANG	87,201,906,000	70,054,090,587	17,147,815,413	80	73,087,438,000	61,653,759,915	11,433,678,085	84
	BELANJA MODAL	24,023,886,000	23,019,123,130	1,004,762,870	96	21,295,295,000	19,551,285,045	1,744,009,955	92
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	145,975,618,000	125,898,311,033	20,077,306,967	86	129,015,096,000	109,881,084,178	19,134,011,822	86
C	PEMBIAYAAN				0				0

Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN Kode Lap : LO.SAT
 ESELON I : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN Tanggal : 16/04/19 12:23
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA Halaman : 1
 SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Prg ID : lap_lo_satker --
 JENIS SATUAN KERJA : KP Tgl Data : 16/04/19 6:00 AM

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	94,847,744	88,401,206	6,446,538	7.292
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	94,847,744	88,401,206	6,446,538	7.292
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	94,847,744	88,401,206	6,446,538	7.292
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	32,904,999,009	28,650,967,351	4,254,031,658	14.848
Beban Persediaan	2,258,173,169	2,153,428,740	104,744,429	4.864
Beban Barang dan Jasa	31,574,187,583	31,409,600,897	164,586,686	0.524
Beban Pemeliharaan	7,618,858,802	10,717,190,548	(3,098,331,746)	(28.91)
Beban Perjalanan Dinas	32,331,698,866	28,482,307,846	3,849,391,020	13.515
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN KEUANGAN AUDITED DJPK TA 2018

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN Kode Lap : LO.SAT
 ESELON I : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN Tanggal : 16/04/19 12:23
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA Halaman : 2
 SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Prg ID : lap_lo_satker --
 JENIS SATUAN KERJA : KP Tgl Data : 16/04/19 6:00 AM

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	8,805,762,583	6,217,885,641	2,587,876,942	41.62
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	22,601	(1,818,182)	1,840,783	(101.24 3)
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	115,493,702,613	107,629,562,841	7,864,139,772	7.307
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(115,398,854,869)	(107,541,161,635)	(7,857,693,234)	7.307
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	87,226,145	1,486,352,263	(1,399,126,118)	(94.132)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	121,983,288	1,486,828,263	(1,364,844,975)	(91.796)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	34,757,143	476,000	34,281,143	7,201.9 21
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	375,001,642	59,348,402	315,653,240	531.865
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	427,372,165	143,654,182	283,717,983	197.501
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	52,370,523	84,305,780	(31,935,257)	(37.88)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	462,227,787	1,545,700,665	(1,083,472,878)	(70.096)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(114,936,627,082)	(105,995,460,970)	(8,941,166,112)	8.435
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(114,936,627,082)	(105,995,460,970)	(8,941,166,112)	8.435

Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KP
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 16/04/19 12:24 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	24,255,545,308	18,284,052,781	5,971,492,527	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(114,936,627,082)	(105,995,460,970)	(8,941,166,112)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	98,875,970	0	98,875,970	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	98,875,970	0	98,875,970	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	129,223,086,118	111,966,953,497	17,256,132,621	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	14,385,335,006	5,971,492,527	8,413,842,479	-
EKUITAS AKHIR	38,640,880,314	24,255,545,308	14,385,335,006	-



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2018 DAN 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
KDUAPPAW : 015060199KP INSTANSI PUSAT
KODE SATKER : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 16/04/2019 12:23 AM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2018	2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	55,254,165	50,733,906	4,520,259	8.91
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(50,756,507)	(50,733,906)	(22,601)	0.04
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	4,497,658	0	4,497,658	0.00
Persediaan	1,664,950,179	2,258,890,806	(593,940,627)	(26.29)
JUMLAH ASET LANCAR	1,669,447,837	2,258,890,806	(589,442,969)	(26.09)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	100,841,547,680	93,840,931,062	7,000,616,618	7.46
Gedung dan Bangunan	899,754,000	0	899,754,000	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	990,851,337	990,851,337	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	11,732,950,373	789,445,090	10,943,505,283	1,386.23
Konstruksi Dalam Pengerjaan	20,956,000	0	20,956,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(78,730,034,313)	(73,783,134,345)	(4,946,899,968)	6.70
JUMLAH ASET TETAP	35,756,025,077	21,838,093,144	13,917,931,933	63.73
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	3,239,813,385	1,858,698,385	1,381,115,000	74.31
Aset Lain-lain	2,312,638,761	1,934,248,104	378,390,657	19.56
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(4,200,243,826)	(3,577,485,904)	(622,757,922)	17.41
JUMLAH ASET LAINNYA	1,352,208,320	215,460,585	1,136,747,735	527.59
JUMLAH ASET	38,777,681,234	24,312,444,535	14,465,236,699	59.50
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	136,800,920	56,899,227	79,901,693	140.43
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	136,800,920	56,899,227	79,901,693	140.43
JUMLAH KEWAJIBAN	136,800,920	56,899,227	79,901,693	140.43
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	38,640,880,314	24,255,545,308	14,385,335,006	59.31
JUMLAH EKUITAS	38,640,880,314	24,255,545,308	14,385,335,006	59.31
JUMLAH EKUITAS	38,640,880,314	24,255,545,308	14,385,335,006	59.31
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	38,777,681,234	24,312,444,535	14,465,236,699	59.50

LAPORAN REKENING PEMERINTAH

LAPORAN REKENING PEMERINTAH

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

I. Pendahuluan

Laporan rekening pemerintah ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan kerja yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-94/PB/2007 tentang Pelaporan Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara Tingkat Satuan Kerja. Dengan demikian, laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan kementerian negara/lembaga/satuan kerja.

Selain itu, laporan ini juga disusun agar pihak-pihak yang terkait dapat mengetahui secara jelas dan transparan seluruh rekening yang dikuasai oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

II. Rekening Pemerintah Temuan BPK

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2004 s.d. 2006 pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ditemukan sebanyak 1 (satu) rekening yang sama dengan jumlah saldo yang berbeda pada tahun 2004 dan 2005.

Rekapitulasi rekening temuan pemeriksaan BPK menurut tahun anggaran dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Rekapitulasi Rekening Temuan BPK
Pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemneterian Keuangan

Tahun	Giro	Rupiah	Dep.	Rupiah	Total Rek.	Total Rupiah
2004	1	Rp. 246.714.126,00	-	-	1	Rp. 246.714.126,00
2005	1	Rp. 250.690.623,00	-	-	1	Rp. 250.690.623,00
JUMLAH						

III. Langkah dan Hasil Penertiban Rekening Pemerintah

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2007 dan Perdirjen Nomor : 35/PB/2007, telah dilakukan upaya-upaya penertiban rekening pemerintah dengan melakukan inventarisasi terhadap rekening pemerintah.
- Pendataan/inventarisasi yang dilakukan dirancang sehingga mencakup seluruh yang ada pada Kementerian Negara/Lembaga baik yang sudah dilaporkan maupun yang belum dilaporkan dalam Laporan Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan yang disajikan pada Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran serta Rekening Lainnya yang dikuasai oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, inventarisasi yang dilakukan mencakup rekening yang sudah atau yang belum dilaporkan dalam LKPP dan LKKL selama ini, dan yang dilaporkan sebagai temuan audit BPK maupun yang non-temuan BPK.

3. Hasil inventarisasi rekening pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 menunjukkan adanya 5 rekening. Hasil pendataan rekening sebagaimana dilaporkan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Rekapitulasi Seluruh Rekening yang Terdata

No.	Kemete- rian	Eselon 1	Temuan BPK		Tambahkan		Total		
			Rek	Rp	Rek	Rp	Rek	Rp	
1	Kemete- rian Keuangan	Ditjen Perimbangan Keuangan	No. Rek : 0009151586 a.n. Tim Kerja Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Th. 2004 : Rp.246.714.126,00					
				Th. 2005: Rp.250.690.623,00					
				ditutup pada tanggal 13 November 2006					
2					No. Rek. : 1190004710727 a.n. Bendahara Pengeluaran DJPK	Rp. 13.766, 00			
					Ditutup tanggal 28 September 2007				
3			No. Rek. : 125006829 a.n. Bendahara Pengeluaran DJPK	Rp. 861.339, 00					
			Ditutup tanggal 28 September 2007						
4			No. Rek. : 0507.01000136300 a.n. Bendahara Pengeluaran DJPK (DIPA 69)	Rp0					
			Ditutup tanggal 6 Mei 2011						
5			No. Rek. : 119.0004696231 a.n. Bendahara Pengeluaran DJPK (DIPA 15)	Rp0					
			Dipertahankan						
Jumlah									

4. Daftar seluruh rekening yang dipertahankan dapat dilihat pada lampiran A, sedangkan rekening yang telah ditutup pada lampiran B.

BERITA ACARA REKONSILIASI dengan KPPN Jakarta II



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-177773/WPB.11/KP.019/2018

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN (440941) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2018.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	145,975,618,000	145,975,618,000	0
2	Belanja	126,667,252,936	126,667,252,936	0
3	Pengembalian Belanja	-768,941,903	-768,941,903	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	677,539,156	677,539,156	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Budi Hartadi
NIP.197004141997031001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

Doddy Hardiana
NIP.198008132001121001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN (440941)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 145,975,618,000
SAI/SA-BUN : 145,975,618,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 126,667,252,936
SAI/SA-BUN : 126,667,252,936

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -768,941,903
SAI/SA-BUN : -768,941,903

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 677,539,156
SAI/SA-BUN : 677,539,156

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0
SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

Lampiran I
Berita Acara Rekonsiliasi
Nomor: BAR-177773/WPB.11/KP.019/2018
Tanggal : 07/01/2019

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Budi Hartadi
NIP.197004141997031001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

Doddy Hardiana
NIP.198008132001121001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

BERITA ACARA MIGRASI

Saldo awal SAKTI

BERITA ACARA MIGRASI SALDO BUKU BESAR NERACA
DARI APLIKASI SAIBA KE MODUL AKUNTANSI DAN PELAPORAN SAKTI
TINGKAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **April** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** telah dilaksanakan migrasi data saldo buku besar Neraca periode tahun Dua Ribu Tujuh Belas dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi SAKTI. Data hasil migrasi ini akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan implementasi SAKTI pada Satker Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Hasil Migrasi dituangkan dalam Berita Acara Migrasi Saldo Buku Besar Neraca dengan hasil sebagai berikut:

I. DAFTAR ISIAN HASIL MIGRASI SALDO BUKU BESAR NERACA

Kode Akun	Uraian Akun	Nilai Sebelum Migrasi			Nilai Setelah Migrasi	
		Laporan Keuangan (Neraca)	Aplikasi SAIBA	Selisih	Aplikasi SAKTI	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c)-(d)	(f)	(g) = (d)-(f)
115211	Piutang PNBPN	50.733.906	50.733.906	-	50.733.906	-
116211	Peny. Piutang Tak Tertagih-PNBPN	(50.733.906)	(50.733.906)	-	(50.733.906)	-
117111	Barang Konsumsi	2.203.056.576	2.203.056.576	-	2.203.056.576	-
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	55.834.230	55.834.230	-	55.834.230	-
132111	Peralatan dan Mesin	93.840.931.062	93.840.931.062	-	93.840.931.062	-
134113	Jaringan	990.851.337	990.851.337	-	990.851.337	-
135121	Aset Tetap Lainnya	789.445.090	789.445.090	-	789.445.090	-
137111	Akum. Peny. Aset Tetap	(73.440.302.129)	(73.440.302.129)	-	(73.440.302.129)	-
137313	Akum. Peny. Jaringan	(342.832.216)	(342.832.216)	-	(342.832.216)	-
162151	Software	1.718.988.485	1.718.988.485	-	1.718.988.485	-
162161	Lisensi	139.709.900	139.709.900	-	139.709.900	-
166112	Aset Tetap YTD DOP	1.510.449.080	1.510.449.080	-	1.510.449.080	-
166113	Aset Tak Berwujud YTD DOP	423.799.024	423.799.024	-	423.799.024	-
169122	Akum. Peny. Aset Tetap YTD DOP	(1.510.449.080)	(1.510.449.080)	-	(1.510.449.080)	-
169315	Akum. Amortisasi Software	(1.594.339.335)	(1.594.339.335)	-	(1.594.339.335)	-
169316	Akum. Amortisasi Lisensi	(48.898.465)	(48.898.465)	-	(48.898.465)	-
169318	Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud YTD DOP	(423.799.024)	(423.799.024)	-	(423.799.024)	-
212111	Belanja Pegawai YMHD	(56.899.227)	(56.899.227)	-	(56.899.227)	-
391111	Ekuitas	(24.255.545.308)	(24.255.545.308)	-	(24.255.545.308)	-
	Total	101.723.798.690	101.723.798.690	-	101.723.798.690	-

II. KETERANGAN

A. NILAI SEBELUM MIGRASI

Tidak Terdapat selisih antara nilai pada cetakan Neraca dengan Aplikasi SAIBA.

B. NILAI SETELAH MIGRASI

Tidak Terdapat selisih antara nilai pada Aplikasi SAIBA dengan Aplikasi SAKTI.

III. INFORMASI PENTING LAINNYA

Berdasarkan analisa hasil migrasi, *tidak terdapat* pergeseran saldo akun Neraca. Terkait dengan hal tersebut dilampirkan:

1. Neraca versi Laporan Keuangan periode Desember TAYL
2. Neraca dan Neraca Percobaan periode Desember TAYL versi Aplikasi SAIBA (Cetakan Aplikasi)
3. Neraca dan Neraca Percobaan-Akrual periode Desember TAYL versi Aplikasi SAKTI (Cetakan Aplikasi)

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Operator,



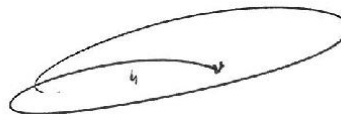
Arum Ritma Ristanti
NIP 19950201 201612 2 003

Kasubbag. Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan II,



Sri Mulyani
NIP 197112031992012001

Kasubbag. Akuntansi dan Pelaporan,



Doddy Hardiana
NIP 19800813 200112 1 001

LAPORAN KEUANGAN AUDITED DJPK TA 2018

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAE1T
Tanggal : 24/04/18
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	44,754	(44,754)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	50,733,906	52,552,088	(1,818,182)	(3.45)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(50,733,906)	(52,552,088)	1,818,182	(3.45)
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Persediaan	2,258,890,806	2,122,858,309	136,032,497	6.40
JUMLAH ASET LANCAR	2,258,890,806	2,122,903,063	136,987,743	6.40
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	93,840,931,062	60,263,306,055	33,577,625,007	55.71
Jalan, Irigasi dan Jaringan	990,851,337	0	990,851,337	0.00
Aset Tetap Lainnya	789,445,090	5,586,982,947	(4,797,537,857)	(85.86)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	49,896,000	(49,896,000)	(100.00)
Akumulasi Penyusutan	(73,783,134,345)	(49,875,870,185)	(23,907,264,160)	47.93
JUMLAH ASET TETAP	21,838,093,144	16,024,314,817	5,813,778,327	36.28
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,858,698,385	1,782,670,785	76,027,600	4.26
Aset Lain-lain	1,934,248,104	3,887,372,050	(1,953,123,946)	(50.24)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(3,577,485,904)	(5,443,968,410)	1,866,482,506	(34.28)
JUMLAH ASET LAINNYA	215,460,585	226,074,425	(10,613,840)	(4.69)
JUMLAH ASET	24,312,444,535	18,373,292,305	5,939,152,230	32.32
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	56,899,227	89,239,524	(32,340,297)	(36.23)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	56,899,227	89,239,524	(32,340,297)	(36.23)
JUMLAH KEWAJIBAN	56,899,227	89,239,524	(32,340,297)	(36.23)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	24,255,545,308	18,284,052,781	5,971,492,527	32.65
JUMLAH EKUITAS	24,255,545,308	18,284,052,781	5,971,492,527	32.65

**NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : NSATE1T
Tanggal : 24/04/18
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	24,312,444,535	18,373,292,305	5,939,152,230	32.32

Jakarta, 31 Desember 2017
Kuasa Pengguna Anggaran

Rukijo
NIP. 19670210 199310 1 001

LAPORAN KEUANGAN AUDITED DJPK TA 2018

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : NPSA/TKT
Tanggal : 26-04-18
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	50,733,906	
0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB		50,733,906
0	117111	Barang Konsumsi	2,203,056,576	
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	55,834,230	
0	132111	Peralatan dan Mesin	93,840,931,062	
0	134113	Jaringan	990,851,337	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	789,445,090	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		73,440,302,129
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan		342,832,216
0	162151	Software	1,718,988,485	
0	162161	Lisensi	139,709,900	
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1,510,449,080	
0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	423,799,024	
0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		1,510,449,080
0	169315	Akumulasi Amortisasi Software		1,594,339,335
0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi		48,898,465
0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		423,799,024
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		56,899,227
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		109,881,084,178
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,727,983,827	
0	313211	Transfer Keluar	11,432,514,703	
0	313221	Transfer Masuk		3,961,023,264
0	391111	Ekuitas		18,284,052,781
0	391131	Pengesahan Hibah Langsung		11,285,344,585
3	423119	Pendapatan Penjualan Lainnya		1,150,000
3	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		1,486,828,263
3	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		240,386
3	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		87,010,820
3	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		30,982,380
3	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		61,641,564
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		51,030,238
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	19,726,200,380	
3	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS		9,007,800

LAPORAN KEUANGAN AUDITED DJPK TA 2018

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NPSAIKT
Tanggal : 26-04-18
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	291,787	
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		1,864
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,401,245,330	
3	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS		556,600
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	428,428,114	
3	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS		222,640
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,384,530,000	
3	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS		40,355,000
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	398,160,000	
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	70,872,060	
3	511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS		1,755
3	511125	Beban Tunj. Beras PNS	1,103,825,640	
3	511129	Beban Uang Makan PNS	2,772,434,811	
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	681,865,000	
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS		22,326,112
3	512211	Beban Uang Lembur	755,586,000	
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	817,412,944	
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	596,792,100	
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	749,170,000	
3	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja		570,000
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,199,141,185	
3	521211	Beban Bahan	6,147,335,685	
3	521211	Pengembalian Beban Bahan		2,863,800
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,759,260,000	
3	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan		712,500
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	351,663,696	
3	522112	Beban Langganan Telepon	89,321,722	
3	522131	Beban Jasa Konsultansi	11,686,344,585	
3	522141	Beban Sewa	1,332,448,295	
3	522151	Beban Jasa Profesi	3,213,021,961	
3	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi		285,000
3	522191	Beban Jasa Lainnya	1,472,120,024	
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,292,265,140	
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,771,990,125	
3	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,379,052,825	

LAPORAN KEUANGAN AUDITED DJPK TA 2018

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 26-04-18
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	252,714,000	
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	11,052,384,995	
3	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa		226,932,926
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	492,370,000	
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,144,092,400	
3	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		3,152,500
3	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,236,969,931	
3	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		213,424,054
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6,117,076,312	
3	591313	Beban Penyusutan Jaringan	14,643,889	
3	592115	Beban Amortisasi Software	72,100,950	
3	592116	Beban Amortisasi Lisensi	13,970,990	
3	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	93,500	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,153,428,740	
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	21,168,458	
3	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	84,305,780	
3	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPN		1,818,182
3	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	476,000	
		J U M L A H	223,120,872,574	223,120,872,574

LAPORAN KEUANGAN AUDITED DJPK TA 2018

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PEMBUKUAN DASAR AKRUAL PER 31 DESEMBER 2017

Kode Lap : NPSAICS
Tanggal : 30-04-2018
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
JENIS KEWENANGAN : KP Kantor Pusat

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	50,733,906	0
2	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	50,733,906
2	117111	Barang Konsumsi	2,203,066,576	0
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	55,834,230	0
2	132111	Peralatan dan Mesin	93,840,931,062	0
2	134113	Jaringan	990,851,337	0
2	135121	Aset Tetap Lainnya	789,445,090	0
2	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	73,440,302,129
2	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	342,832,216
2	162151	Software	1,718,988,485	0
2	162161	Lisensi	139,709,900	0
2	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,510,449,080	0
2	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	423,799,024	0
2	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,510,449,080
2	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,594,339,335
2	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	48,898,465
2	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	423,799,024
2	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	56,899,227
2	391111	Ekuitas	0	24,255,545,308
JUMLAH			101,723,798,690	101,723,798,690

LAPORAN KEUANGAN AUDITED DJPK TA 2018

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2017 (DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LSAIKB
Tanggal : 30-04-2018
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
JENIS KEWENANGAN : KP Kantor Pusat

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Piutang Bukan Pajak	50,733,906
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(50,733,906)
Persediaan	2,258,890,808
Jumlah ASET LANCAR	2,258,890,806
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	93,840,931,062
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(73,440,302,129)
Peralatan dan Mesin (Netto)	20,400,628,933
Jalan, Irigasi dan Jaringan	990,851,337
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(342,832,216)
Jalan, Irigasi dan Jaringan (Netto)	648,019,121
Aset Tetap Lainnya	789,445,080
Jumlah ASET TETAP	21,838,093,144
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	1,858,698,385
Aset Lain-lain	1,934,248,104
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1,510,449,080)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(2,087,036,824)
Jumlah ASET LAINNYA	215,460,585
Jumlah ASET	24,312,444,535
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga	56,899,227
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	56,899,227
Jumlah KEWAJIBAN	56,899,227
EKUITAS DANA	
Ekuitas	
Ekuitas	24,255,545,308
Jumlah EKUITAS DANA	24,255,545,308
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	24,312,444,535

RESUME MIGRASI SALDO AWAL
 MODUL PERSEDIAAN, ASET TETAP, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN SAKTI
 TINGKAT SATUAN KERJA

Pada hari **Rabu** tanggal **Empat Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** telah migrasi data saldo awal untuk modul Persediaan, Aset Tetap, serta Akuntansi dan Pelaporan SAKTI. Data hasil migrasi ini akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan implementasi SAKTI pada Satker Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Hasil Migrasi dituangkan dalam Berita Acara Migrasi Saldo Buku Besar Neraca dengan hasil sebagai berikut:

I. DAFTAR ISIAN HASIL MIGRASI SALDO AWAL

A. MODUL PERSEDIAAN DENGAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN (GLP)

Kode Akun	Uraian Akun	Nilai Setelah Migrasi		
		Modul GLP (Neraca)	Modul Persediaan	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c)-(d)
117111	Barang Konsumsi	2.203.056.576	2.203.056.576	-
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	55.834.230	55.834.230	-
Total		2.258.890.806	2.258.890.806	-

B. MODUL ASET TETAP DENGAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN (GLP)

Kode Akun	Uraian Akun	Nilai Setelah Migrasi		
		Modul GLP (Neraca)	Modul Aset Tetap	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c)-(d)
132111	Peralatan dan Mesin	93.840.931.062	93.840.931.062	0
134113	Jaringan	990.851.337	990.851.337	0
135121	Aset Tetap Lainnya	789.445.090	789.445.090	0
137111	Akum. Peny. Aset Tetap	(73.440.302.129)	(73.440.302.129)	0
137313	Akum. Peny. Jaringan	(342.832.216)	(342.832.216)	0
162151	Software	1.718.988.485	1.718.988.485	0
162161	Lisensi	139.709.900	139.709.900	0
166112	Aset Tetap YTD DOP	1.510.349.080	1.510.449.080	0
166113	Aset Tak Berwujud YTD DOP	423.799.024	423.799.024	0
169122	Akum. Peny. Aset Tetap YTD DOP	(1.510.449.080)	(1.510.449.080)	0
169315	DOP			
169316	Akum. Amortisasi Software	(1.594.339.335)	(1.594.339.335)	0
169318	Akum. Amortisasi Lisensi	(48.898.465)	(48.898.465)	0
	Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud YTD DOP	(423.799.024)	(423.799.024)	0
Total				0

II. KETERANGAN

A. MODUL PERSEDIAAN DENGAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN (GLP)

Tidak Terdapat selisih nilai migrasi antara Modul Persediaan dengan Modul Akuntansi dan Pelaporan.

B. MODUL ASET TETAP DENGAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN (GLP)

Tidak Terdapat selisih nilai migrasi antara Modul Aset Tetap dengan Modul Akuntansi dan Pelaporan.

III. INFORMASI PENTING LAINNYA

Berdasarkan analisa hasil migrasi, tidak terdapat selisih nilai modul Persediaan, Aset Tetap, serta Akuntansi dan Pelaporan SAKTI dengan hal tersebut dilampirkan:

1. Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Persediaan periode Desember TAYL (Cetakan Aplikasi SAKTI Modul GLP)
2. Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Aset Tetap periode Desember TAYL (Cetakan Aplikasi SAKTI Modul GLP)

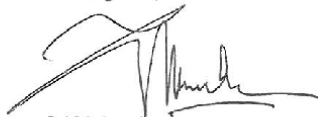
Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Operator,



Arum Ritma Ristanti
NIP 19950201 201612 2 003

Kasubbag. Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan II,



Sri Mulyani
NIP 197112031992012001

Kasubbag. Akuntansi dan Pelaporan,



Doddy Hardiana
NIP 19800813 200112 1 001

REKONSILIASI ASET TETAP
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 06 DIREKTORAT JENDERAL PERUBAHAN KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 440341 DIREKTORAT JENDERAL PERUBAHAN KEUANGAN
JENIS KEWENANGAN : KP Kantor Pusat

Kode Lap : LRREK.01
Tanggal : 30-04-2018
Halaman : 1

KODE	NAMA AKUN	NILAI NERACA	NILAI SUB-LEDGER	SELISIH
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	93,840,931,062	93,840,931,062	0
134113	Jaringan	990,851,337	990,851,337	0
135121	Aset Tetap Lainnya	789,445,090	789,445,090	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(73,440,302,129)	(73,440,302,129)	0
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(342,832,216)	(342,832,216)	0
162151	Software	1,718,988,485	1,718,988,485	0
162161	Lisensi	139,709,900	139,709,900	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,510,449,080	1,510,449,080	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	423,799,024	423,799,024	0
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1,510,449,080)	(1,510,449,080)	0
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,594,339,335)	(1,594,339,335)	0
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(48,898,465)	(48,898,465)	0
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(423,799,024)	(423,799,024)	0

REKONSILIASI PERSEDIAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
 JENIS KEWENANGAN : KP Kantor Pusat

Kode Lap : LRREK.01
 Tanggal : 30-04-2018
 Halaman : 1

KODE	NAMA AKUN	NILAI NERACA	NILAI SUB-LEDGER	SELISIH
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	2.203.056,576	2.203.056,576	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	55.834.230	55.834.230	0



**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**